



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

**PERJANJIAN KINERJA  
KOTA PADANG PANJANG  
TAHUN 2019**

**BAGIAN ORGANISASI SETDAKO PADANG PANJANG  
TAHUN 2019**



BERGELIN ROSE PADANG BANUANG

BERGELIN ROSE  
KIMBERLY  
ATC PADANG BANUANG  
TAHUN 2019

BERGELIN ROSE  
KIMBERLY  
ATC PADANG BANUANG  
TAHUN 2019

# KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'almiin puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan izin-Nya penyusunan Perjanjian Kinerja Kota Padang Panjang Tahun 2019 dapat diselesaikan. Perjanjian Kinerja Kota Padang Panjang Tahun 2019 merupakan salah satu dokumen yang disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2015

Perjanjian Kinerja Kota Padang Panjang Tahun 2019 ini disusun mengacu pada RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Padang Panjang yang telah ditetapkan serta menyesuaikan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2019 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 5 Tahun 2019 dan Perwako Nomor 39 Tahun 2019.

Dokumen Perjanjian Kinerja ini merupakan kesepakatan kinerja antara Kepala Daerah dengan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh OPD sesuai dengan dokumen perencanaan daerah.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan masukan bagi penyelesaian penyusunan Perjanjian Kinerja Perubahan ini, dengan harapan kiranya hal ini dapat memberikan kontribusi terhadap pemerintahan dan pembangunan Kota Padang Panjang





# **DAFTAR ISI**

Kata Pengantar  
Daftar Isi

i  
ii

## BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang	1
1.1 Dasar Hukum	2
1.2 Pengertian dalam Perjanjian Kinerja	2
1.3 Tujuan Perjanjian Kinerja	4
1.4 Ruang Lingkup Perjanjian Kinerja	5
1.5 Keterkaitan dengan Sistem AKIP	5
1.6 Format Perjanjian Kinerja	5
1.7 Sistematika Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2019	6

## BAB II STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

2.1 Sekretariat Daerah	8
2.2 Sekretariat DPRD	8
2.3 Inspektorat Kota	9
2.4 Dinas Daerah	9
2.5 Badan Daerah Kota	11
2.6 Kecamatan	12

## BAB III RENCANA STRATEGIK

3.1 Visi	15
3.2 Misi	16
3.3 Tujuan	16
3.4 Sasaran	17

## BAB IV PERJANJIAN KINERJA

4.1 Pernyataan Perjanjian Kinerja Kota	19
4.2 Perjanjian Kinerja Kota	19

## BAB V PENUTUP

27

## LAMPIRAN

Pernyataan Perjanjian Kinerja OPD	
Perjanjian Kinerja OPD	

ii



# **BAB I**

# **PENDAHULUAN**

## **LATAR BELAKANG**

Dokumen Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja merupakan komitmen antara penerima amanah dan kesepakatan antara penerima amanah dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja ini merupakan salah satu bentuk implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pemerintah Daerah diamanatkan pada setiap tahun semua instansi pemerintahan sebagai unsur penyelenggara pemerintah negara harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai tindak lanjut Peraturan tersebut, Pemerintah Kota Padang Panjang berkewajiban menyusun dan menyampaikan perjanjian kinerjanya kepada instansi berwenang. Secara teknis, penyusunan Perjanjian Kinerja, tidak hanya untuk Pejabat Struktural tingkat atas seperti penjabat setingkat Eselon II, namun juga untuk Penjabat Eselon III dibawahnya. Dengan demikian, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ada di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang, wajib menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja.

Perjanjian Kinerja ini mengacu pada RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023. Selain itu, Perjanjian Kinerja ini juga mengacu pada dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2019 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 5 Tahun 2019.



diwujudkan oleh seorang penjabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Perjanjian Kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimilikinya. Setelah ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2019.

- 2) Pernyataan Perjanjian Kinerja merupakan suatu pernyataan kesanggupan dari pimpinan instansi/unit kerja penerima amanah kepada atasan langsungnya untuk mewujudkan suatu target kinerja tertentu.
- 3) Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
- 4) Pengukuran Kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang ditetapkan.
- 5) Pemantauan kinerja adalah serangkaian kegiatan pengamatan perkembangan kinerja pelaksanaan program atau kegiatan dengan menggunakan informasi: (1) hasil pengukuran kinerja dan (2) identifikasi, analisis serta antisipasi masalah yang timbul dan atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
- 6) Instansi Pemerintah adalah sebuah kolektif dari unit organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, meliputi Kementerian Koordinator/Kementerian Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota serta lembaga-lembaga pemerintah yang menjalankan fungsi pemerintahan dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- 7) Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih baik spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.



- 8) Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indikator*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
- 9) Target kinerja merupakan ukuran kuantitatif dari setiap indikator kinerja yang akan dicapai dalam satu tahun tertentu.
- 10) Indikator Kinerja maksudnya adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan, indikator kinerja dapat berupa output maupun outcome.
- 11) Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran sebagian atau seluruhnya dari APBD dan/atau APBD.
- 12) Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada satu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengelahan sumber daya berupa personil (sumber daya manusia), barang model termasuk perlatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.
- 13) Unit kerja Mandiri adalah unit organisasi di lingkungan instansi pemerintah yang memiliki dan mengelola sendiri sumber daya berupa sumber daya manusia, anggaran serta sarana dan prasarana yang ada di lingkungannya.

### 1.3 Tujuan Perjanjian Kinerja

Adapun yang menjadi tujuan umum dari Perjanjian Kinerja ini adalah :

- 1) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
- 2) Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- 3) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- 4) Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;



- 5) Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Sedangkan tujuan khusus Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut:

- 1) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sehingga terdapat keseriusan dalam menjalankan amanah tersebut.
- 2) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.
- 3) Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
- 4) Sebagai salah satu dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan sanksi.

#### **1.4 Ruang Lingkup Perjanjian Kinerja**

Ruang lingkup Perjanjian Kinerja mencakup seluruh tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah Kota Padang Panjang, dengan fokus utama adalah berbagai program utama yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2018 sesuai dengan RPJMD Kota Padang Panjang. Disamping itu juga ditetapkan program utama dari OPD yang meliputi program-program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan isu-isu strategis yang sedang dihadapi organisasi atau tantangan kedepan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan tugas.

#### **1.5 Keterkaitan dengan Sistem AKIP**

Pada dasarnya, Perjanjian Kinerja merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Perjanjian Kinerja adalah bagian penting transparansi pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan. Dengan adanya penyusunan perjanjian kinerja ini diharapkan dapat mendorong keberhasilan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

#### **1.6 Format Perjanjian Kinerja Perjanjian**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

the role of inspezione (inspections) in Italy's Pmi sector, and to explore how these may be used to enhance the quality of management control systems in Italian SMEs. (The term 'management control system' is used here to denote a set of processes, systems and structures designed to facilitate the achievement of organizational goals.)

This paper first presents the background to the Italian Pmi sector and its characteristics.

Secondly, it describes the empirical analysis. This includes an examination of the M&C practices of Italian SMEs, and the third section discusses the findings and concludes with some final remarks.

**1. Introduction** In Italy, the term 'Pmi' refers to small and medium-sized enterprises (SMEs). It is a broad category that includes companies with up to 250 employees, and which is subdivided into three categories: microenterprises (with less than 10 employees), small enterprises (between 10 and 49 employees) and medium-sized enterprises (between 50 and 250 employees). The Italian Pmi sector is characterized by a high level of fragmentation, with over 90% of firms being family-owned and employing less than 10 people (Istat, 2008). The Italian Pmi sector is also characterized by a high level of innovation, with a significant number of firms investing in research and development (R&D) activities (Istat, 2008). The Italian Pmi sector is also characterized by a high level of internationalization, with many firms exporting their products and services to foreign markets (Istat, 2008).

**2. The Italian Pmi sector and its characteristics** The Italian Pmi sector is characterized by a high level of fragmentation, with over 90% of firms being family-owned and employing less than 10 people (Istat, 2008). The Italian Pmi sector is also characterized by a high level of innovation, with a significant number of firms investing in research and development (R&D) activities (Istat, 2008). The Italian Pmi sector is also characterized by a high level of internationalization, with many firms exporting their products and services to foreign markets (Istat, 2008).

**3. The role of inspezione in Italy's Pmi sector** The Italian Pmi sector is characterized by a high level of fragmentation, with over 90% of firms being family-owned and employing less than 10 people (Istat, 2008). The Italian Pmi sector is also characterized by a high level of innovation, with a significant number of firms investing in research and development (R&D) activities (Istat, 2008). The Italian Pmi sector is also characterized by a high level of internationalization, with many firms exporting their products and services to foreign markets (Istat, 2008).

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, format Perjanjian Kinerja terdiri atas dua bagian yaitu Formulir Pernyataan Perjanjian Kinerja dan Lampiran Formulir Perjanjian Kinerja mempedomani aturan tersebut, maka format perjanjian kinerja juga mempedomani hal tersebut :

**1) Pernyataan Perjanjian Kinerja**

Pernyataan Perjanjian Kinerja merupakan suatu pernyataan kesanggupan dari pimpinan instansi/unit kerja penerima amanah kepada atasan langsungnya untuk mewujudkan suatu target kinerja tertentu dalam hal ini Pemerintah Kota Padang Panjang untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan janji kesanggupan dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (penerima amanah), kepada atasan langsung untuk Tahun 2019.

**2) Lampiran Perjanjian Kinerja**

Lampiran Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Padang Panjang dan seluruh OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Pemerintah Kota Padang Panjang yang memuat sasaran, indikator kinerja, target kinerja, Program dan kegiatan utama serta jumlah anggaran yang dialokasikan, yang akan diwujudkan baik oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), maupun Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2019.

**1.7 Sistematika Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2019**

Berikut ini sistematika penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2019 dapat diuraikan sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, dasar hukum, beberapa pengertian-pengertian yang berhubungan dengan Perjanjian Kinerja, tujuan, ruang lingkup, keterkaitan dengan sistem AKIP, format dan sistematika penyusunan Perjanjian Kinerja.

**BAB II STRUKTURAL ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI**

Bab ini menjelaskan tentang Struktural Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kota Padang Panjang.



### **BAB III RENCANA STRATEGIK**

Bab ini menguraikan tentang Visi, Misi dan Penetapan Tujuan, Sasaran dan Cara Pencapaiannya.

### **BAB IV Perjanjian Kinerja**

Bab ini terdiri atas Perjanjian Kinerja dan Lampiran yang berisi Sasaran Strategik, Indikator Kinerja, Target Kinerja, Program/Kegiatan dan Jumlah Anggaran yang dialokasikan.

### **BAB V PENUTUP**

Bagian terakhir ini memuat beberapa poin penting sebagai kesimpulan dan saran tentang Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Padang Panjang.



# **BAB II**

# **STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut :

## **2.1 Sekretariat Daerah**

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kota dan bertanggungjawab kepada Walikota. Sekretariat Daerah Kota membantu Walikota penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

- 1) Pengkoordiansian penyusunan kebijakan Daerah;
- 2) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat daerah;
- 3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah
- 4) Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **2.2 Sekretariat DPRD**

Sekretariat DPRD Kota merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD Kota, Sekretariat DPRD Kota dipimpin oleh Sekretaris DPRD Kota yang dalam melaksanakan tugas secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD Kota dan secara administratif bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Sekretaris DPRD diangkat dan diberhentikan oleh dengan Keputusan Walikota atas persetujuan pimpinan DPRD Kota setelah berkonsultasi dengan pimpinan fraksi. Sekretariat DPRD Kota mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kota, serta diperlukan oleh DPRD Kota dalam melaksanakan hak dan fungsinya dengan



kebutuhan, Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD Kota;
- 2) Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD Kota;
- 3) Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD Kota; dan
- 4) Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD Kota.

### **2.3 Inspektorat**

Inspektorat Kota merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dipimpin oleh Inspektur, Inspektur dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Inspektorat Daerah Kota membina dan mengawasi pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Inspektorat Daerah kota dalam melaksanakan tugas menyelenggaraan fungsi sebagai berikut :

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitas pengawasan;
- 2) Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya.
- 3) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan teartentu atas penugasan Walikota;
- 4) Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- 5) Pelaksanaan administrasi Inspektorat Kota; dan
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **2.4 Dinas Daerah**

Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dinas Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas Daerah Kota yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melaui Sekretaris Daerah Kota. Dinas Daerah Kota mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota.



Dinas Daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 2) Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 4) Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Dinas Daerah Kota Padang Panjang berdasarkan Perda Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan, urusan pemerintah bidang Pemuda dan Olahraga serta urusan pemerintah bidang Kebudayaan.
- 2) Dinas Kesehatan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Kesehatan;
- 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan urusan pemerintahan bidang Pertanahan;
- 4) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Tipe B, menyelenggarakan urusan pemrintah bidang Perumuhan dan Kawasan Permukiman, dan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
- 5) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe C, menyelenggarakan urusann pemerintahan bidang Kententeraman dan ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat;
- 6) Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial, urusan pemrintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 7) Dinas Perhubungan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;

Die drei Tiere sind auf dem Bild dargestellt. Ein Löwe ist im Vordergrund zu sehen, ein Wolf im Hintergrund und ein Stier rechts im Bild.

Die drei Tiere sind auf dem Bild dargestellt. Ein Löwe ist im Vordergrund zu sehen, ein Wolf im Hintergrund und ein Stier rechts im Bild. Die drei Tiere sind auf dem Bild dargestellt. Ein Löwe ist im Vordergrund zu sehen, ein Wolf im Hintergrund und ein Stier rechts im Bild.

Die drei Tiere sind auf dem Bild dargestellt. Ein Löwe ist im Vordergrund zu sehen, ein Wolf im Hintergrund und ein Stier rechts im Bild. Die drei Tiere sind auf dem Bild dargestellt. Ein Löwe ist im Vordergrund zu sehen, ein Wolf im Hintergrund und ein Stier rechts im Bild.

Die drei Tiere sind auf dem Bild dargestellt. Ein Löwe ist im Vordergrund zu sehen, ein Wolf im Hintergrund und ein Stier rechts im Bild.

Die drei Tiere sind auf dem Bild dargestellt. Ein Löwe ist im Vordergrund zu sehen, ein Wolf im Hintergrund und ein Stier rechts im Bild.

Die drei Tiere sind auf dem Bild dargestellt. Ein Löwe ist im Vordergrund zu sehen, ein Wolf im Hintergrund und ein Stier rechts im Bild.

Die drei Tiere sind auf dem Bild dargestellt. Ein Löwe ist im Vordergrund zu sehen, ein Wolf im Hintergrund und ein Stier rechts im Bild.

Die drei Tiere sind auf dem Bild dargestellt. Ein Löwe ist im Vordergrund zu sehen, ein Wolf im Hintergrund und ein Stier rechts im Bild.

Die drei Tiere sind auf dem Bild dargestellt. Ein Löwe ist im Vordergrund zu sehen, ein Wolf im Hintergrund und ein Stier rechts im Bild.

- 8) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Admininstrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 9) Dinas Komunikasi dan Dinas Informatika Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang Statistik, dan urusan pemerintahan bidang Persandian;
- 10)Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja;
- 11)Dinas Pariwisata Tipe C, menyelenggarakan urusan pemrintahan bidang Pariwisata;
- 12)Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe C, menyelenggarakan urusan bidang Perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang Kearsipan;
- 13)Dinas Pangan dan Pertanian Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan, urusan pemerintahan bidang Pertanian, urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;dan
- 14)Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan Perdagangan, urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan urusan pemerintahan bidang Perindustrian.

## 2.5 Badan Daerah Kota

Badan Daerah Kota merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi wewenang Daerah Kota. Badan Daerah Kota dipimpin oleh Kepala Badan Daerah Kota yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota. Badan Daerah Kota mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.

- 1) Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 2) Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 3) Pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

9) Diese Reaktionsschritte des Prozesses in Step C, welche lediglich zu einem leichten Polymerisationsgrad führen, sind:

- B) Eine Komplexbildung zwischen Titel C und dem Initiator
- C) Eine Polymerisation unter Anwesenheit eines Katalysators
- D) Eine Polymerisation unter Anwesenheit eines Radikals

10) Diese Reaktionen führen zu einem Molekyl mit einem Polymerkettenende, das:

- A) eine Kettenverzweigung ist
- B) eine Kettenabbruchreaktion ist
- C) eine Kettenverlängerung ist
- D) eine Ketteninitiation ist

11) Diese Polymerisation ist eine:

- A) radikalische Polymerisation
- B) anionische Polymerisation
- C) kationische Polymerisation
- D) katalytische Polymerisation

12) Bei der Polymerisation von Propen wird ein Polymer mit einem Kettenende, das:

- A) eine Kettenverzweigung ist
- B) eine Kettenabbruchreaktion ist
- C) eine Kettenverlängerung ist
- D) eine Ketteninitiation ist

13) Bei der Polymerisation von Acrylnitril wird ein Polymer mit einem Kettenende, das:

- A) eine Kettenverzweigung ist
- B) eine Kettenabbruchreaktion ist
- C) eine Kettenverlängerung ist
- D) eine Ketteninitiation ist

14) Bei der Polymerisation von Styrol wird ein Polymer mit einem Kettenende, das:

- A) eine Kettenverzweigung ist
- B) eine Kettenabbruchreaktion ist
- C) eine Kettenverlängerung ist
- D) eine Ketteninitiation ist

2.5

- 4) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Badan Daerah Kota Padang Panjang berdasarkan Perda Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Penelitian dan Pengembangan;
- 2) Badan Pengelola Keuangan Daerah Tipe C, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Keuangan; dan
- 3) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe C, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.

## 2.6 Kecamatan

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota. Camat mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1) Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
- 2) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- 3) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- 4) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Walikota;
- 5) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- 6) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- 7) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan;

4) Bei der Anwendung dieses Prinzipes ist die Verteilung der Kosten auf die einzelnen Produkte zu berücksichtigen. Dies ist im allgemeinen der Fall, wenn die Kosten für die Produktion eines Produktes höher sind als die Kosten für die Produktion eines anderen Produktes.

Abbildung 3 zeigt, dass die Kosten für die Produktion eines Produktes höher sind als die Kosten für die Produktion eines anderen Produktes. Das bedeutet, dass die Kosten für die Produktion eines Produktes höher sind als die Kosten für die Produktion eines anderen Produktes. Das bedeutet, dass die Kosten für die Produktion eines Produktes höher sind als die Kosten für die Produktion eines anderen Produktes.

5) Bei der Anwendung dieses Prinzipes ist die Verteilung der Kosten auf die einzelnen Produkte zu berücksichtigen. Dies ist im allgemeinen der Fall, wenn die Kosten für die Produktion eines Produktes höher sind als die Kosten für die Produktion eines anderen Produktes.

6) Bei der Anwendung dieses Prinzipes ist die Verteilung der Kosten auf die einzelnen Produkte zu berücksichtigen. Dies ist im allgemeinen der Fall, wenn die Kosten für die Produktion eines Produktes höher sind als die Kosten für die Produktion eines anderen Produktes.

7) Bei der Anwendung dieses Prinzipes ist die Verteilung der Kosten auf die einzelnen Produkte zu berücksichtigen. Dies ist im allgemeinen der Fall, wenn die Kosten für die Produktion eines Produktes höher sind als die Kosten für die Produktion eines anderen Produktes.

8) Bei der Anwendung dieses Prinzipes ist die Verteilung der Kosten auf die einzelnen Produkte zu berücksichtigen. Dies ist im allgemeinen der Fall, wenn die Kosten für die Produktion eines Produktes höher sind als die Kosten für die Produktion eines anderen Produktes.

- 8) Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Pemerintahan Daerah Kota yang ada di Kecamatan; dan
- 9) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan Walikota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota. Camat dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Perangkat Kecamatan.

Adapun Kecamatan yang ada di lingkungan : Pemerintah Kota Padang Panjang berdasarkan Perda Kota Padang Panjang berdasarkan Perda Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

- 1) Kecamatan Padang Panjang Timur Tipe B,
- 2) Kecamatan Padang Panjang Barat Tipe B.

Adapun Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Walikota Padang Panjang sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah diatur dengan Perwako No. 29/2016
2. Sekretariat DPRD diatur dengan Perwako No. 30/2016
3. Inspektorat Daerah diatur dengan Perwako No. 31/2016
4. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga diatur dengan Perwako No. 32/2016
5. Dinas Kesehatan diatur dengan Perwako No. 33/2016
6. Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang diatur dengan Perwako No. 34/2016
7. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup diatur dengan Perwako No. 35/2016
8. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran diatur dengan Perwako No. 36/2016
9. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diatur dengan Perwako No. 37/2016
10. Dinas Perhubungan diatur dengan Perwako No. 38/2016



11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diatur dengan Perwako No. 39/2016
12. Dinas Komunikasi dan Informatika diatur dengan Perwako No. 40/2016
13. Dinas Penanaman modal dan PTSP diatur dengan Perwako No. 41/2016
14. Dinas Pariwisata diatur dengan Perwako No. 43/2016
15. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan diatur dengan Perwako No. 44/2016
16. Dinas Pangan dan Pertanian diatur dengan Perwako No. 44/2016
17. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah diatur dengan Perwako No. 45/2016
18. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah diatur dengan Perwako No. 36/2016
19. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah diatur dengan Perwako No. 47/2016
20. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM diatur dengan Perwako No. 48/2016
21. Kecamatan Padang Panjang Barat diatur dengan Perwako No. 49/2016
22. Kecamatan Padang Panjang Timur diatur dengan Perwako No. 49/2016
23. BPBD dan Kesbangpol diatur dengan Perwako No. 49/2010
24. Rumah Sakit Umum Daerah diatur dengan Perwako No.41/2010



# **BAB III**

# **RENCANA STRATEGIK**

Rencana strategik merupakan alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini, untuk melakukan proyeksi kondisi masa datang dengan memanfaatkan segenap potensi sumber daya yang ada. Untuk instansi pemerintah, rencana strategik tersebut memuat antara lain visi, misi, tujuan, sasaran, strategi kebijakan dan program serta ukuran capaian dalam pelaksanaannya. Selanjutnya, Perencanaan strategik tersebut secara umum mengandung makna suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun sampai 10 (sepuluh) tahun ke depan, yang disusun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan kekuatan, potensi, peluang dan tantangan yang ada atau yang mungkin timbul.

Sebagai organisasi publik, Pemerintah Kota Padang Panjang perlu menyusun dan menetapkan rencana strategik. Ini menjadi penting karena dengan adanya Rencana Strategik tersebut, akan dapat diketahui sejauh mana kinerja yang telah berhasil dicapai dan apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Rencana strategik tersebut adalah berupa RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 serta Renstra SKPD. Beberapa variabel rencana strategik yang dikemukakan dalam Perjanjian Kinerja Kota Padang Panjang Tahun 2019 ini mengacu kepada RPJMD Kota Padang Panjang tahun 2018-2023. Variabel strategik tersebut antara lain sebagai berikut:

## **3.1 Visi**

Visi merupakan pandangan jauh ke depan tentang apa yang akan dicapai oleh suatu organisasi atau lembaga. Adapun rumusan visi Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut "**UNTUK KEJAYAAN PADANG PANJANG YANG BERMARWAH DAN BERMARTABAT**".

Dari Visi Kota Padang Panjang yang telah disepakati tersebut, ada beberapa hal pokok dan makna yang perlu dipahami yaitu antara lain:

и на съвременният южнославянски език и култура, като съществуващи във времето на българската държава и църква. Това е и основната причина за това, че във времето на българската държава и църква не съществуваха писаните езотерични текстове, които са съществували във времето на българската държава и църква. Тези езотерични текстове са съществували във времето на българската държава и църква, но не са съществували във времето на българската държава и църква.

Съществуващите във времето на българската държава и църква писани езотерични текстове са съществували във времето на българската държава и църква, но не са съществували във времето на българската държава и църква. Тези езотерични текстове са съществували във времето на българската държава и църква, но не са съществували във времето на българската държава и църква.

Съществуващите във времето на българската държава и църква писани езотерични текстове са съществували във времето на българската държава и църква, но не са съществували във времето на българската държава и църква.

Съществуващите във времето на българската държава и църква писани езотерични текстове са съществували във времето на българската държава и църква, но не са съществували във времето на българската държава и църква.

### **3.2 Misi**

Misi pada dasarnya merupakan upaya yang ditetapkan untuk mewujudkan visi pembangunan daerah. Berdasarkan pengertian visi yang dikemukakan diatas, serta untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut, ditetapkan beberapa misi utama yang akan dilaksanakan dalam periode 5 tahun mendatang. Misi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi unggulan daerah berbasis pembangunan berkelanjutan
2. Meningkatkan pemerataan dan kualitas daya saing SDM masyarakat yang berakhhlak dan berbudaya
3. Meningkatkan tata kelola pemerintah yang responsif inovatif dan partisipatif

### **3.3 Tujuan**

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi dengan tetap mempertimbangkan faktor-faktor yang menjadi kunci keberhasilan dan merupakan sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu. Tujuan dapat juga dikatakan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu.

Memahami hal tersebut dan sesuai dengan RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 beberapa tujuan yang hendak diwujudkan adalah:

**Misi Pertama Meningkatnya perekonomian daerah yang berkelanjutan bertujuan untuk:**

- 1) Meningkatnya perekonomian daerah yang berkelanjutan
- 2) Meningkatnya kesejahteraan masyarakat

**Misi Kedua Meningkatnya pemerataan kualitas daya saing SDM masyarakat yang berakhhlak dan berbudaya bertujuan untuk:**

- 1) Meningkatnya pemerataan dan kualitas daya saing SDM yang sehat, berakhhlak dan unggul
- 2) Terwujudnya tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tenram dan agamis

Wirtschaftswissenschaften auf der einen Seite und Politikwissenschaften auf der anderen Seite. Beide Disziplinen haben unterschiedliche Akzente. So ist die Politikwissenschaft eher auf die politische Praxis und die Politiktheorie ausgerichtet, während die Wirtschaftswissenschaften eher auf die theoretische Analyse und die empirische Untersuchung von Wirtschaftsvorgängen ausgerichtet sind. Beide Disziplinen haben jedoch gemeinsame Methoden und Theorien, die sie in ihrer Arbeit unterstützen. Ein Beispiel für eine solche Theorie ist das Modell der rationalen Erwartungen, das in beiden Disziplinen Anwendung findet.

### Übersicht

Die Wirtschaftswissenschaften und Politikwissenschaften unterscheiden sich in ihrer Methodik und Theoriebildung. Die Wirtschaftswissenschaften verwenden empirische Methoden, um die Realität zu untersuchen, während die Politikwissenschaften eher auf theoretische Modelle und Konzepte setzen. Beide Disziplinen haben jedoch gemeinsame Methoden und Theorien, die sie in ihrer Arbeit unterstützen. Ein Beispiel für eine solche Theorie ist das Modell der rationalen Erwartungen, das in beiden Disziplinen Anwendung findet.

Wirtschaftswissenschaften und Politikwissenschaften unterscheiden sich in ihrer Methodik und Theoriebildung. Die Wirtschaftswissenschaften verwenden empirische Methoden, um die Realität zu untersuchen, während die Politikwissenschaften eher auf theoretische Modelle und Konzepte setzen. Beide Disziplinen haben jedoch gemeinsame Methoden und Theorien, die sie in ihrer Arbeit unterstützen. Ein Beispiel für eine solche Theorie ist das Modell der rationalen Erwartungen, das in beiden Disziplinen Anwendung findet.

**Misi Ketiga Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang responsif, inovatif dan partisipatif bertujuan untuk:**

- 1) Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih
- 2) Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan

#### **3.4 Sasaran**

Sasaran mengandung makna sebagai penjabaran dari tujuan, merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Berikut ini digambarkan sasaran Kota Padang Panjang tersebut dan kaitannya dengan Misi dan Tujuan seperti dilihat pada tabel berikut :

<b>Misi</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>
<b>Meningkatnya perekonomian daerah yang berkelanjutan</b>	Meningkatnya perekonomian daerah yang berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Meningkatnya daya saing ekonomi unggulan daerah yang tangguh berbasis ekonomi kerakyatan</li><li>2. Meningkatnya kualitas infrastruktur berkelanjutan</li></ol>
	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menurunnya ketimpangan kesejahteraan masyarakat</li><li>2. Menurunnya angka kemiskinan</li><li>3. Menurunnya tingkat pengangguran</li><li>4. Meningkatnya pendapatan masyarakat</li></ol>
<b>Meningkatnya pemerataan kualitas daya saing SDM masyarakat yang berakhhlak dan berbudaya</b>	Meningkatnya pemerataan dan kualitas daya saing SDM yang sehat, berakhhlak dan unggul	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Meningkatnya pemerataan kualitas daya saing pendidikan</li><li>2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat</li></ol>
	Terwujudnya tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menurunnya masalah kesejahteraan sosial</li><li>2. Meningkatnya aktivitas keagamaan di masyarakat</li></ol>



<b>Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang responsif, inovatif dan partisipatif</b>	<b>Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah</li> <li>2. Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas dan melayani</li> </ol>
	Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya peran serta kelompok lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan</li> <li>2. Meningkatnya pemberdayaan perempuan</li> </ol>

alien	անօտակինություն պատրաստվածություն քաղաքացիություն գործազրկություն գործազրկություն պատրաստվածություն պատրաստվածություն	1	բարեկարգություն պատրաստվածություն գործազրկություն գործազրկություն պատրաստվածություն պատրաստվածություն պատրաստվածություն	1
specimen	փոլորդ մանիք գործազրկություն պատրաստվածություն	2	օգոլական անօտակինություն գործազրկություն պատրաստվածություն	2

# **BAB IV**

# **PERJANJIAN KINERJA**

Secara konseptual Perjanjian Kinerja dapat dipandang sebagai suatu kontrak kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasannya yang menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkannya. Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2019 merupakan dokumen pernyataan Perjanjian Kinerja Walikota Padang Panjang dan antara Walikota Padang Panjang sebagai atasan dengan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang, untuk mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan dengan alokasi anggarannya telah disediakan dalam APBD Pemerintahan Kota Padang Panjang Tahun 2019.

Dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2019 dan Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat daerah Lingkup Pemerintah Kota Padang Panjang akan dijadikan acuan dalam mengukur pencapaian kinerja dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah baik tingkat OPD maupun tingkat Pemerintah kota.

Sekaitan dengan itu, dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 3 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019, maka disusunlah Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Padang Panjang yang terdiri dari Pernyataan Perjanjian Kinerja Kota dan Pernyataan Perjanjian Kinerja OPD berikut dengan Lampiran Perjanjian Kinerja yang terdiri dari :

- A. Pernyataan Perjanjian Kinerja Kota Dan Perjanjian Kinerja OPD
- B. Perjanjian Kinerja OPD
  - 1. Sekretariat Daerah
  - 2. Sekretariat DPRD
  - 3. Inspektorat Daerah
  - 4. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
  - 5. Dinas Kesehatan
  - 6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
  - 7. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan lingkungan Hidup



8. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9. Dinas Perhubungan
10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
11. Dinas Komunikasi dan Informatika
12. Dinas Penanaman Modal dan PTSP
13. Dinas Pariwisata
14. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
15. Dinas Pangan dan Pertanian
16. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
17. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
18. Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
19. Badan Pengelola Keuangan Daerah
20. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
21. BPBD dan Kesbangpol
22. Kecamatan Padang Panjang Barat
23. Kecamatan Padang Panjang Timur
24. RSUD

Selanjutnya dimuat dalam Lampiran Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Padang Panjang tahun 2019 ini

8. Ein neuer Name für die Partei wird vorgeschlagen.  
9. Die Partei wird als „Partei der Arbeit“ bezeichnet.  
10. Der Name „Arbeitspartei“ wird als offizielle Bezeichnung angenommen.  
11. Die Partei kann sich nicht mehr mit dem Namen „SPD“ bezeichnen.  
12. Der Name „SPD“ darf nur noch bei Wahlkämpfen und Pressemitteilungen benutzt werden.  
13. Der Name „SPD“ darf nicht mehr benutzt werden.  
14. Der Name „SPD“ darf nur noch bei Wahlkämpfen und Pressemitteilungen benutzt werden.  
15. Der Name „SPD“ darf nicht mehr benutzt werden.  
16. Der Name „SPD“ darf nur noch bei Wahlkämpfen und Pressemitteilungen benutzt werden.  
17. Der Name „SPD“ darf nicht mehr benutzt werden.  
18. Der Name „SPD“ darf nur noch bei Wahlkämpfen und Pressemitteilungen benutzt werden.  
19. Der Name „SPD“ darf nicht mehr benutzt werden.  
20. Der Name „SPD“ darf nur noch bei Wahlkämpfen und Pressemitteilungen benutzt werden.  
21. Der Name „SPD“ darf nicht mehr benutzt werden.  
22. Der Name „SPD“ darf nicht mehr benutzt werden.  
23. Der Name „SPD“ darf nicht mehr benutzt werden.  
24. Der Name „SPD“ darf nicht mehr benutzt werden.

Geheimrat Dr. Albert Giesecke, 19. Mai 1949, Tempelhof, Berlin, mit dem Vorsitzenden der SPD-Bundestagsfraktion, Dr. Walter Ulbricht



## **WALIKOTA PADANG PANJANG**

---

### **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FADLY AMRAN, BBA  
Jabatan : WALIKOTA PADANG PANJANG

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Padang Panjang, 11 Maret 2019  
**WALIKOTA PADANG PANJANG**

  
**FADLY AMRAN, BBA**



## PT. MALKOTA PADANG PANTAI

PERJALANAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka memberikan informasi kepada pemangku kepentingan mengenai kinerja dan pencapaian pada tahun 2018, perusahaan kami menyampaikan laporan ini.

Berdasarkan laporan ini, pada tahun 2018

perusahaan mencapai pertumbuhan pendapatan

sebesar 10% dibandingkan dengan periode

yang sama pada tahun sebelumnya.

Pada tahun 2018, perusahaan mencapai pertumbuhan pendapatan sebesar 10% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Berdasarkan laporan ini, pada tahun 2018

perusahaan mencapai pertumbuhan pendapatan

sebesar 10% dibandingkan dengan periode

yang sama pada tahun sebelumnya.

**PERJANJIAN KINERJA  
PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG  
TAHUN ANGGARAN 2019**

NO	VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019	OPD PENANGGUNG JAWAB SUMBER DATA
	<b>VISI : UNTUK KEJAYAAN PADANG PANJANG YANG BERMARWAH DAN BERMARTABAT</b>				
I	<b>MISI I</b> Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Unggulan Daerah Berbasis Pembangunan Berkelanjutan"				
T1.	<b>Meningkatnya Perekonomian Daerah Yang Berkelanjutan</b>		1. Laju Pertumbuhan Ekonomi	5.96	BPS, Lintas Perangkat Daerah
	S1.	Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Unggulan Daerah Yang Tangguh dan Berbasis Ekonomi Kerakyatan	1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran 3. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri 4. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 5. Jumlah Kunjungan Wisata 6. Persentase Kenaikan Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur 7. IKLH	3.05 5.02 2.28 7.61 600.000 orang 0.50 65.25-66.57	BPS, Dinas Pangan Pertanian BPS, Disdagkop UMKM BPS, Disdagkop UMKM BPS, Lintas Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Dinas PUPR Dinas Perkim LH
	S2.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Berkelanjutan			
T2.	<b>Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat</b>		2. PDRB Perkapita	48.19	BPS
	S3.	Menurunnya Angka Kemiskinan	8. Angka Kemiskinan	5.45	BPS
	S4.	Menurunnya Angka Pengangguran	9. Indeks Gini	0.28	BPS
	S5.	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	10. Tingkat Pengangguran Terbuka 11. Pengeluaran Perkapita (Daya Beli Masyarakat)	4.84 10.29	BPS, Lintas Perangkat Daerah BPS
II.	<b>MISI 2</b> Meningkatkan Pemerataan Kualitas Daya Saing SDM Masyarakat Yang Berakhlik dan Berbudaya				
T3.	<b>Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Daya Saing SDM yang sehat, berakhlik dan unggul</b>		3. Indeks Pembangunan Manusia	78.25	BPS, Lintas Perangkat Daerah
	S6.	Meningkatnya Pemerataan Kualitas Daya Saing Pendidikan	12. Rata-rata Lama Sekolah	11.88	BPS, Dinas Pendidikan
	S7.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	13. Harapan Lama Sekolah 14. Angka Harapan Hidup	15.27 72.47	BPS, Dinas Pendidikan BPS, Dinas Kesehatan
T4.	<b>Terwujudnya tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tenram dan agamis</b>		4. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum	96.37	Lintas Perangkat Daerah
	S8.	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum	15. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum	96.37	Lintas Perangkat Daerah
NO	VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019	OPD PENANGGUNG JAWAB/ SUMBER DATA
	S9.	Menurunnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	16. Persentase Penurunan Jumlah PMKS	2.34	Dinas Sosial
	S10.	Meningkatnya Aktivitas Keagamaan di Masyarakat	17. Persentase aktivitas kegiatan keagamaan di mesjid	38.82	Bag. Kesra



III.	<b>MISI 3</b> Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Responsif, Inovatif dan Partisipatif			
T5.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	5. Indeks Reformasi Birokrasi	62	Inspektorat Daerah
	S11. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah S12. Terselenggaranya Pelayanan Publik	18. Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 19. Indeks Kepuasan Masyarakat	B (65) 78 (Baik)	Lintas Perangkat Daerah Lintas Perangkat Daerah
T6.	Meningkatnya Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam pembangunan	6. Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif	70	Lintas Perangkat Daerah
	S13. Meningkatnya Peran Serta Kelompok /Lembaga Kemasyarakatan Dalam Pembangunan S14. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	20. Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif 21. Indeks Pemberdayaan Gender	70 77.50	Lintas Perangkat Daerah Dinas Sosial PPKBPPPA

No.	Sasaran/Program	Anggaran	Ket
1.	<b>Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Unggulan Daerah yang Tangguh Berbasis Ekonomi Kerakyatan</b>	<b>13.316.226.100,00</b>	
	1. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 2. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 3. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Kecil Menengah 4. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 5. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 6. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 7. Program Peningkatan Ketahanan Pangan 8. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 9. Program Pengembangan Budidaya Perikanan 10. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 11. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	197.545.000 1.343.544.000 467.000.000 734.340.000 2.664.316.000 2.385.225.000 882.304.800 1.783.728.000 590.609.000 1.973.464.300 294.150.000	Disdagkop UMKM Disdagkop UMKM Disdagkop UMKM Disdagkop UMKM Dinas Pariwisata Dinas Pariwisata Dinas Pangan Pertanian Dinas Pangan Pertanian Dinas Pangan Pertanian Dinas Pangan Pertanian Dinas PMPTSP
2.	<b>Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Berkelanjutan</b>	<b>46.272.883.000,00</b>	
	1. Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Publik 2. Program Pembangunan dan Pemeliharaan Trotoar 3. Program Pembangunan/Rehabilitasi Jalan dan Jembatan 4. Program Penerangan Jalan Umum 5. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 6. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 7. Program Perencanaan, Penataan, Penataan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang 8. Program Pencegahan Dini dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana 9. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 10. Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam 11. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	11.811.680.000 3.729.975.000 10.119.550.000 2.373.749.600 1.239.774.700 4.490.007.550 728.098.800 1.756.381.000 7.836.171.350 1.076.520.000 1.110.975.000	Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas PUPR Dinas Perhubungan Dinas PUPR Dinas PUPR BPBD Kesbangpol Dinas Perkim LH Dinas Perkim LH Dinas Perkim LH
3.	<b>Menurunnya Angka Kemiskinan</b>	<b>18.240.579.800,00</b>	
	1. Program Kewirausahaan Bagi Masyarakat Miskin 2. Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Berbasis Pertanian 3. Program Bangunan Tempat Tinggal dan Pemberdayaan Komunitas Permukiman 4. Program Upaya Kesehatan Masyarakat	1.469.950.000 457.395.300 892.750.000 15.420.484.500	Disdagkop UMKM Dinas Pangan Pertanian Dinas Perkim LH Dinas Kesehatan



<b>4.</b>	<b>Menurunnya Angka Pengangguran</b>	<b>133.467.500</b>	
	1. Program Peningkatan Kesempatan Kerja	133.467.500	DPMPTSP
<b>5.</b>	<b>Meningkatnya Pendapatan Masyarakat</b>	<b>629.344.800</b>	
	1. Program Pengembangan Rumah Wirausaha	554.345.000	Disdagkop UMKM
	2. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	74.999.800	Dinas Pangan Pertanian
<b>6.</b>	<b>Meningkatnya Pemerataan Kualitas Daya Saing Pendidikan</b>	<b>32.496.753.500</b>	
	1. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Masyarakat	2.493.971.000	Dinas Perpustakaan dan Arsip
	2. Program Padang Panjang Juara	855.800.000	Disdikpora
	3. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	2.062.488.500	Disdikpora
	4. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	21.219.658.000	Disdikpora
	5. Program Pendidikan Anak Usia Dini	4.698.175.000	Disdikpora
	6. Program Pendidikan Non Formal	1.166.661.000	Disdikpora
<b>7.</b>	<b>Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat</b>	<b>100.698.322.000</b>	
	1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat	15.420.484.500	Dinas Kesehatan
	2. Program Pembekalan Gizi Masyarakat	198.074.000	Dinas Kesehatan
	3. Program Pengembangan Lingkungan Sehat	729.200.000	Dinas Kesehatan
	4. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit	303.523.000	Dinas Kesehatan
	5. Program Pembinaan dan Pernasyarakatan Olah Raga	1.474.420.000	Disdikpora
	6. Program Layanan Kesehatan Rumah Sakit	65.495.950.000	RSUD
	7. Program Pelayanan Kesehatan	978.833.500	Dinas Kesehatan
	8. Program Pengendalian Penduduk dan KB	2.601.887.000	Dinas Sosial PPKBPPP
	9. Program Peningkatan Sarana Prasarana Rumah Sakit	13.495.950.000	RSUD
<b>8.</b>	<b>Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>4.558.679.000</b>	
	1. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	4.558.679.000	Satpol PP
<b>9.</b>	<b>Menurunnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial</b>	<b>1.605.048.500</b>	
	1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	608.583.500	Dinas Sosial PPKBPPP
	2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	996.465.000	Dinas Sosial PPKBPPP
<b>10.</b>	<b>Meningkatnya Aktivitas Keagamaan di Masyarakat</b>	<b>10.550.945.000</b>	
	1. Program Koordinasi Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Budaya dan Keagamaan	9.360.475.000	Bagian Kesra
	2. Program Pemajuan Kebudayaan	1.190.470.000	Disdikpora
<b>11.</b>	<b>Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah</b>	<b>16.940.217.275</b>	
	1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah	973.411.700	Bappelitbang
	2. Program Penelitian dan Pengembangan	1.515.900.000	Bappelitbang
	3. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	965.260.000	Inspektorat Kota
	4. Program Peningkatan Kinerja Instansi Pemerintah	243.346.250	Bag. Organisasi
	6. Program Peningkatan dan Pengelolaan Penganggaran Daerah	1.503.190.000	BPKD
	7. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	273.568.000	BPKD
	8. Program Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Daerah	422.897.000	Dinas Perpustakaan dan Arsip
	9. Program Peningkatan Akses Kualitas Informasi Publik	2.388.755.325	Dinas Kominfo
	10. Program e-Government	7.990.214.000	Dinas Kominfo
	11. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	663.675.000	BKPSDM
<b>12.</b>	<b>Terselenggaranya Pelayanan Publik</b>	<b>1.728.238.500</b>	
	1. Program Administrasi Kependudukan	1.059.569.000	Dinas Duk Capil
	2. Program Koordinasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	438.730.000	Bag. Organisasi
	3. Program Pelayanan Terpadu Satu Pintu	38.939.500	DPMPTSP
	4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	191.000.000	Dinas Duk Capil
<b>13.</b>	<b>Meningkatnya Peran Serta Kelompok /Lembaga Kemasyarakatan Dalam Pembangunan</b>	<b>11.407.265.500,00</b>	
	1. Program Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan/Kelurahan	7.763.121.500	Kecamatan
	2. Program Peningkatan Kelembagaan Masyarakat	2.186.607.000	Dinas Sosial PPKBPPP
	3. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	1.116.012.000	Disdikpora
	4. Program Pemenuhan Hak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	341.525.000	Dinas Sosial PPKBPPP



14	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	343.904.000,00	
	1 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender	343.904.000	Dinas Sosial PPKBPPPA

Padang Panjang, 11 Maret 2019  
WALIKOTA PADANG PANJANG

FADLY AMRAN, BBA

00000000	00000000	00000000
00000000	00000000	00000000

WALKING PADING SAMAWANG  
Lipapung-sabud, II Meter 208

Area of Arman

# **BAB V**

# **PENUTUP**

Perjanjian Kinerja Kota Padang Panjang Tahun 2019, merupakan tekad dan janji Pemerintah Kota Padang Panjang sekaligus tekad dan janji kepala OPD untuk pencapaian rencana kinerja tahunan dalam rangka memenuhi amanat perundangan. Perjanjian Kinerja ini adalah bagian dari upaya nyata untuk memerangi korupsi dengan melakukan perubahan mendasar terhadap manajemen pemerintahan sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2014 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Dalam Perjanjian Kinerja ini dilakukan penyesuaian-penyesuaian baik dari aspek dokumen perencanaan yakni RPJMD Kota Padang Panjang tahun 2018-2023 maupun dari program dan kegiatan pada OPD sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2019.

Perjanjian Kinerja Kota Padang Panjang Tahun 2019 diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang berbagai rencana capaian kinerja dari seluruh OPD yang ada. Selain itu, juga bagian dari transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Kota Padang Panjang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (Good Governance) maupun pemerintahan yang bersih (Clean Governance)

Dengan ditandatanganinya Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2019 ini, berarti Pemerintah Kota Padang Panjang telah dapat memenuhi salah satu kewajiban akuntabilitas yang merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah





## PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Sutan Syahrir No. 178 Padang Panjang  
Telp: (0752) 82200 – Faks : (0752) 82870  
Email: kominfo.pdgpanjang@gmail.com - Website: www.padangpanjangkota.go.id

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MARTONI, S. Sos, M. Si  
Jabatan : Pj. SEKRETARIS DAERAH

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : FADLY AMRAN, BBA  
Jabatan : WALIKOTA PADANG PANJANG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
**KOTA PADANG PANJANG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Baik
2	Meningkatnya aktivitas keagamaan di masyarakat	% Lembaga Keagamaan, sosial dan budaya yang dibinda	38,82
3	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan kebijakan sektor perekonomian	% Terselenggaranya kebijakan umum sektor perekonomian Kota Padang Panjang	70
4	Meningkatnya pencapaian pembangunan daerah	% Pencapaian Kegiatan Pembangunan	70
5	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	- Nilai SAKIP - Standar Pelayanan Minimal	B (65) 84,67
6	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	78 (Baik)

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	3.565.435.000
2.	Kerjasama Informasi dengan Media Massa	302.080.000
3.	Penataan Peraturan Perundang-undangan	720.890.000
4.	Penataan Kelembagaan dan Penataan Ketatalaksanaan	113.075.000
5.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	438.730.000
6.	Peningkatan Koordinasi Perekonomian Daerah	195.000.000
7.	Penataan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	453.430.000
8.	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	243.346.250
9.	Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	9.360.475.000

WALIKOTA PADANG PANJANG

FADLY AMRAN, BBA

Padang Panjang, 11 Maret 2019

PI. SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PADANG PANJANG







**PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH**

JL. H. Agus Salim No. 07 RT VI Telp. (0752) 82081 Faxs. (0752) 485775  
Email:polpppadangpanjang@gmail.com - Website:www.padangpanjangkota.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ZULKIFLI, SH

Jabatan : SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA PADANG PANJANG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : FADLY AMRAN, BBA

Jabatan : WALIKOTA PADANG PANJANG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Padang Panjang, 11 Maret 2019  
**PIHAK PERTAMA  
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH**





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**  
**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KOTA PADANG PANJANG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Fasilitasi Penetapan Keputusan DPRD dan Berita Acara/Nota Kesepakatan/ Persetujuan Bersama Antara DPRD Dan Pemerintah Daerah dan PERDA Usulan Eksekutif (PEMKO) Serta Penyerapan Aspirasi Masyarakat	Percentase Fasilitasi Penetapan Keputusan DPRD dan Berita Acara/Nota Kesepakatan/Persetujuan Bersama Antara DPRD dan Pemerintah	70%

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Penyelenggaraan kelembagaan DPRD	19.123.280.000
2.	Legalisasi Peraturan Perundang-undangan	563.050.000
3.	Kerjasama Informasi dengan Media Massa	430.600.000



Padang Panjang, 11 Maret 2019  
**SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA PADANG PANJANG**



SECRETARIAAT DEWAN PERMAMPUAN RAKYAT DERAH  
KOTA PADANG PANJANG

TARGET	IMPLEMENTASI KINERJA	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR
100%	9	8	4
100%	5	5	5

ANGGARAN  
10.000.000.000  
2.000.000.000  
10.000.000.000

Persebaran Pendapatan Menteri 2010  
SECRETARIAAT DEWAN PERMAMPUAN RAKYAT DERAH  
KOTA PADANG PANJANG

PROGERIA  
90%  
5  
5  
5

ANGGARAN PENDAPATAN MENTERI 2010





**PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG**  
**INSPEKTORAT DAERAH**

Jl. Sutan Syahrir No.324 Telp. ( 0752 ) 84506 padang panjang 27118

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ERVIC RINALDY, SH

Jabatan : Inspektur Daerah Kota Padang Panjang

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : FADLY AMRAN, BBA

Jabatan : Walikota Padang Panjang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua  
**WALIKOTA PADANG PANJANG**  
  
FADLY AMRAN, BBA

Padang Panjang, 2 Januari 2019

Pihak Pertama  
**INSPEKTUR DAERAH**  
**KOTA PADANG PANJANG**

  
ERVIC RINALDY, SH  
NIP. 19640815 199003 1 009



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**  
**INSPEKTORAT DAERAH**  
**KOTA PADANG PANJANG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	- Persentase OPD yang memiliki nilai evaluasi SAKIP oleh Inspektorat minimal B dan CC	30%
2	Meningkatnya Penerapan Zona Integritas	- Persentase OPD yang mendapatkan predikat WBBM dan WBK	4%

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	970.260.000



Padang Panjang, 11 Maret 2019  
 INSPEKTUR  
 KOTA PADANG PANJANG

ERVIC RINALDY, SH  
 NIP. 19640815 199003 1 009

ОНОЖИНАН АКЫЛЫН НАУКАЛАМАР  
САРАСТАЙСТЫРЫЛЫМ  
СМАЛДАНАДАСАТЫН

СЕРТИФИКАТ	ИНДИКАТОР НИЗЕНДІ	СЕРТИФИКАТ	САРАСТАЙСТЫРЫЛЫМ
№ 1	С	№ 1	С
Андрей Семёнов	Республиканский центр по оценке и сертификации и аккредитации в области промышленной политики и инноваций	Андрей Семёнов	Республиканский центр по оценке и сертификации и аккредитации в области промышленной политики и инноваций

САРАСТАЙСТЫРЫЛЫМ

Сертификат

Сертификат о соответствии тендерных предложений на право заключения контракта на выполнение работ по оценке и сертификации в области промышленной политики и инноваций

Андрей Семёнов

С





## PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

JL. BUNDO KANDUANG NO. 1 TELP. (0752) 82156, FAX. (0752) 82128  
PADANG PANJANG

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :Dr. DESMON, M.Pd  
Jabatan :KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KOTA PADANG PANJANG

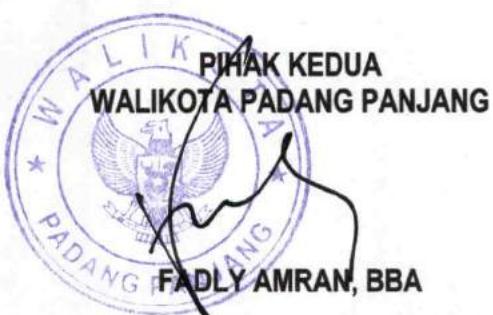
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : FADLY AMRAN, BBA  
Jabatan : WALIKOTA PADANG PANJANG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Padang Panjang, 11 Maret 2019  
**PIHAK PERTAMA**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA**  
**DAN OLAHRAGA**

Dr. DESMON, M.Pd  
NIP. 19681020 199003 1 004



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KOTA PADANG PANJANG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkat dan meratanya kualitas pendidikan dengan SDM yang unggul, berdaya saing dan berkarakter islami	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Angka Kelulusan (AL) SD 100%</li> <li>- Angka Kelulusan (AL) SMP 100%</li> <li>- Peringkat UN SMP di Sumatera barat 4 dari 19 Kab/Kota</li> <li>- Rata-Rata Nilai UN SD 77</li> <li>- Rata-Rata Nilai UN SMP 57</li> </ul>	
2	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman budaya daerah yang diwujudkan dalam karakter dan pelestarian budaya		2500 orang
3	Terfasilitasinya pembinaan olahraga berkesinambungan dan kompetisi olahraga yang terstruktur serta berkelanjutan	Prestasi Olahraga	6 Prestasi Tingkat Provinsi
4	Terfasilitasinya pembinaan pemuda berkarakter kuat dan bertaqwa	Pemuda Berprestasi	3 Prestasi Tingkat Provinsi

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3.015.000.000,00
2.	Program Pendidikan Anak Usia Dini	4.698.175.000,00
3.	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	21.219.658.000,00
4.	Program Pendidikan Non Formal	1.166.661.000,00
5.	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	2.908.676.250,00
6.	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	2.062.488.500,00
7.	Program BOS	7.480.000.000,00
8.	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	1.116.012.000,00
9.	Program Pembinaan dan Pemasarkan Olahraga	1.474.420.000,00
10.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	1.155.000.000,00
11.	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	1.190.470.000,00



Padang Panjang, 11 Maret 2019  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA  
DAN OLAHRAGA KOTA PADANG PANJANG**

Dr. DESMON, M. Pd  
NIP. 19681020 199003 1 004

1994 ՏԱՐԾԱԿԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ

ՏՎԵՐԴ	ԱՎԱՐԿՈՒՄ ԽՈՎ	ԽՈՎ	ՏՎԵՐԴ	ԱՎԱՐԿՈՒՄ ԽՈՎ	ԽՈՎ
9007	ՏԵՇԱՐԱՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ	ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ	9007	ՏԵՇԱՐԱՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ	ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
9001	ՏԵՇԱՐԱՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ	ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ	9001	ՏԵՇԱՐԱՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ	ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ՏՎԵՐԴ 9007 և 9001	ՏԵՇԱՐԱՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ	ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ	ՏՎԵՐԴ 9007 և 9001	ՏԵՇԱՐԱՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ	ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
75	ՏԵՇԱՐԱՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ	ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ	75	ՏԵՇԱՐԱՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ	ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
78	ՏԵՇԱՐԱՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ	ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ	78	ՏԵՇԱՐԱՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ	ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ՏՎԵՐԴ 9020	ՏԵՇԱՐԱՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ	ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ	ՏՎԵՐԴ 9020	ՏԵՇԱՐԱՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ	ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
9007	ՏԵՇԱՐԱՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ	ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ	9007	ՏԵՇԱՐԱՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ	ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ՏՎԵՐԴ 9020	ՏԵՇԱՐԱՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ	ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ	ՏՎԵՐԴ 9020	ՏԵՇԱՐԱՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ	ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
9001	ՏԵՇԱՐԱՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ	ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ	9001	ՏԵՇԱՐԱՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ	ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ՏՎԵՐԴ 9020	ՏԵՇԱՐԱՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ	ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ	ՏՎԵՐԴ 9020	ՏԵՇԱՐԱՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ	ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ

ՀԱՅԱՍՏԱՆ  
00,000,000,214,8  
00,000,011,073,4  
00,000,015,315,12  
00,000,016,085,7  
00,000,016,208,2  
00,000,016,300,5  
00,000,016,304,5  
00,000,016,311,7  
00,000,016,314,1  
00,000,016,321,1  
00,000,016,325,1  
00,000,016,326,7

ՀԱՅԱՍՏԱՆ  
00,000,000,214,8  
00,000,011,073,4  
00,000,015,315,12  
00,000,016,085,7  
00,000,016,208,2  
00,000,016,300,5  
00,000,016,304,5  
00,000,016,311,7  
00,000,016,314,1  
00,000,016,314,8  
00,000,016,315,1  
00,000,016,315,4  
00,000,016,316,1

ՏԵՇԱՐԱՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ԵՎԱՀԱՆՐԱԴՐԱՄԱԿԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ

ԵՎԱՀԱՆՐԱԴՐԱՄԱԿԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ԵՎԱՀԱՆՐԱԴՐԱՄԱԿԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ



## PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG DINAS KESEHATAN

Jln.K.H.Ahmad Dahlan No.05 Padang Panjang 27128 (0752) 83146  
Fax (0752) 83146 Email : dinkes.kotapadangpanjang@gmail.com

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs.Nuryanuwar,Apt.MM,M.Kes

Jabatan : KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA PADANG PANJANG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : FADLY AMRAN, BBA

Jabatan : WALIKOTA PADANG PANJANG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akanmewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Padang Panjang, 11 Maret 2019

PIHAK PERTAMA  
KEPALA DINAS KESEHATAN

Drs.NURYANUWAR,Apt.MM,M.Kes  
Nip. 19620123 199101 1 001

PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

DINAS KESIHATAN

Jl. Raya Padang Panjang No. 0258 RT. 002 RW. 002  
Fax (0362) 83146 E-mail : [kotapadangpanjang@jmlink.com](mailto:kotapadangpanjang@jmlink.com)



PERJALANAN KURIRAT YUNN SENG

Surat ini merupakan surat resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang yang bertujuan untuk memberitahukan bahwa

Seorang pengusaha bernama Yunus yang berdomisili di Jl. Raya Padang Panjang

Memiliki sebuah perusahaan bernama PT. YUNN SENG

Yang berlokasi di Jl. Raya Padang Panjang No. 0258 RT. 002 RW. 002

Untuk mendapatkan izin operasional perusahaan

PT. YUNN SENG dibutuhkan surat resmi dari Dinas Kesehatan

Untuk mendapatkan surat resmi ini

Harus melalui jalur administrasi dan mengikuti proses

Surat ini ditujukan kepada seluruh warga negara Indonesia yang berada di dalam wilayah

Wilayah Pemerintah Kota Padang Panjang yang berada di bawah naungan Dinas Kesehatan

Untuk mendapatkan surat resmi ini, warga negara Indonesia yang berada di dalam wilayah

Wilayah Pemerintah Kota Padang Panjang yang berada di bawah naungan Dinas Kesehatan

Harus melalui jalur administrasi dan mengikuti proses

Bantuan dan Pengembangan Ekonomi

PT. YUNN SENG

Dinas Kesehatan

YUNN SENG

PT. YUNN SENG

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**

**DINAS KESEHATAN**

**KOTA PADANG PANJANG**

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Tercapainya Masyarakat Sehat	- Indeks Keluarga Sehat - Persentase Stunting - Angka Kematian Ibu (AKI) - Angka Kematian Bayi (AKB) - Persentase UHC	0,35 17,50% 0 12 96,25%

<b>NO</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN</b>
1.	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	886.278.000
2.	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	15.420.484.500
3.	Program pengawasan Obat dan Makanan	96.780.000
4.	Program Promosi kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	271.125.000
5.	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	198.074.000
6.	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	729.200.000
7.	Program Pencegahan dan penanggulangan Penyakit Menular	303.523.000
8.	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	233.727.500
9.	Program Pengadaan, Peningkatan dan perbaikan sarana dan Prasarana	1.007.097.000
10.	Puskesmas/Puskesmas pembantu dan jaringannya	33.500.000
11.	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	332.565.000
12.	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	401.500.000
13.	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	



DINAS KESIHATAN  
KOTA BANDUNG PANJANG

TARGET	INDIKATOR KINERJA	PERGALIAN STATEGIS	NO
+	3	3	1
0.38	Jumlah Kegiatan Gizi	Jumlah Kegiatan Gizi	2
15.800	Pengembangan Gizi	Pengembangan Gizi	3
0	Audits kesehatan di AKU	Audits kesehatan di AKU	4
25	Adopsi Kebutuhan Pali (AKU)	Adopsi Kebutuhan Pali (AKU)	5
26.526	Pembentukan UHC	Pembentukan UHC	6

ANGGARAN

Rp 89.518.000

12.400.484.200

600.000.000

23.152.000

88.074.000

1.000.000.000

23.253.000

23.252.600

1.004.007.000

000.000.000

000.283.000

000.000.104

PERCERAIAN

NO

Bantuan untuk pengembangan dan pengelolaan Rumah Sakit

Penyelesaian perselisihan hak milik tanah

Dinas Kesehatan  
Kota Bandung Panjang



WAKIL KETUA DPRD KOTA BANDUNG PANJANG

ABDUL MAJID



**PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM**  
**DAN PENATAAN RUANG**

Jl. Soekarno-Hatta No. 104 Telp. (0752) 82565 Fax. (0752) 82565 Padang Panjang

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YAS EDIZARWIN, SH

Jabatan : KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PADANG  
PANJANG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : FADLY AMRAN, BBA

Jabatan : WALIKOTA PADANG PANJANG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Padang Panjang, 11 Maret 2019  
**PIHAK PERTAMA**  
**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN**  
**PENATAAN RUANG**

YAS EDIZARWIN, SH  
NIP. 19630727 199203 1 004



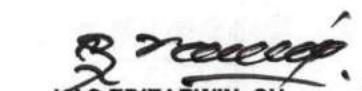
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
**KOTA PADANG PANJANG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya infrastruktur dasar publik yang sesuai standar	- Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	90,50%
		- Persentase trotoar jalur utama yang ramah disabilitas	17%
		- Persentase Rumah Tinggal dengan bersanitasi layak	79%
		- Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	88%
		- Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak	100%
		- Proporsi tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat	27%
2	Meningkatnya kesesuaian guna lahan dengan rencana tata ruang	- Luasan Ruang Terbuka Hijau Publik sebesar 20% dari luas	2,46%
		- Rasio Bangunan ber IMB persatuan bangunan	49/64

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Pembangunan Jalan dan jembatan	10.119.550.000
2.	Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	9.398.855.000
3.	Pembangunan dan Pemeliharaan Trotoar	3.729.975.000
4.	Bangunan Air kotor Perkotaan	3.629.000.000
5.	Pembangunan Kinerja Air Minum dan Air Limbah	2.367.810.800
6.	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	300.000.000
7.	Pembinaan Jasa Konstruksi	318.135.000
8.	Pengelolaan Ruang Terbuka hijau	4.490.007.550
9.	Perencanaan, penataan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang	728.098.800



Padang Panjang, 11 Maret 2019  
**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN  
 PENATAAN RUANG KOTA PADANG PANJANG**

  
**YAS EDIZARWIN, SH**  
 NIP.196307271992031004





**PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG**  
**DINAS PERUMAHAN KAWASAN**  
**PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP**

JL. KH. Ahmad Dahlan No.1 Padang Panjang 27128 Telp (0752) 485541  
Email : [perkimlhpp@gmail.com](mailto:perkimlhpp@gmail.com) Website : [www.padangpanjang.go.id](http://www.padangpanjang.go.id)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WITA DESI SUSANTI, ST  
Jabatan : KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA PADANG PANJANG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : FADLY AMRAN, BBA  
Jabatan : WALIKOTA PADANG PANJANG

Selaku Atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang Panjang, 11 Maret 2019

**PIHAK PERTAMA**

**KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN  
PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA PADANG PANJANG**

  
WITA DESI SUSANTI, ST

NIP. 19741223 200212 2 002





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**  
**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP**  
**KOTA PADANG PANJANG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas pelayanan penyediaan hunian layak bagi masyarakat	- Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak	100%
		- Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%
2	Meningkatnya kualitas lingkungan pemukiman	Persentase pemukiman layak huni	82%
3	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	- Indeks Kualitas Air (IKA)	40,50 - 41,40
		- Indeks Kualitas Udara (IKU)	90 - 93,5
		- Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	65,26

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemukiman	10.569.965.000
2.	Bangunan Tempat Tinggal dan Pemberdayaan Komunitas Pemukiman	892.750.000
3.	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Perkotaan	7.836.171.350
4.	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan	1.076.520.000
5.	Pengendalian Pencemaran , Perusakan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam	980.700.000
6.	Pembangunan Berkelanjutan	21.228.000
7.	Pengendalian Perubahan Iklim	130.275.000



Padang Panjang, 11 Maret 2019  
**KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN  
 PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP  
 KOTA PADANG PANJANG**

WITA DESI SUSANTI, ST  
 NIP. 19741223 200212 2 002

PERJUANGAN KINERJA TAHUN 2013  
DAN PERJUANGAN KAWASAN KERUMIKAN DAN LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA PADANG PANjang

TARGET	INDIKATOR KINERJA	SISTEM STRATEGIS	NO
4000	Jumlah kawasan keramik dan lingkungan hidup yang dilindungi	Wujudkan penerapan peraturan pemerintah dalam perlindungan dan pengembangan lingkungan hidup	1
100%	Jumlah warga yang mendapat pelatihan dan pengetahuan tentang lingkungan hidup	Peningkatan kapasitas dan pengetahuan masyarakat tentang lingkungan hidup	2
80%	Rasio pengembangan teknologi dan inovasi	Peningkatan pengembangan teknologi dan inovasi	3
100% - 100%	Jumlah Keterwakilan PTA (ILCA)	Wujudkan keterwakilan dan representasi perempuan dalam pengambilan keputusan	4
80% - 100%	Jumlah Kepala Desa/Dewan (ILU)	Wujudkan keterwakilan dan representasi perempuan dalam pengambilan keputusan	5
80%	Jumlah Kepala Dinas Lingkungan Hidup (ILP)	Wujudkan keterwakilan dan representasi perempuan dalam pengambilan keputusan	6

AMARDAHAN  
10.288.000.000  
885.000.000  
2.896.151.920  
1.018.650.000  
480.500.000  
51.535.000  
10.055.000

PROGRAM  
Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Keramik dan Lingkungan Hidup  
Bantuan dan Pengembangan Kawasan Keramik dan Lingkungan Hidup  
Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Keramik dan Lingkungan Hidup  
Bantuan dan Pengembangan Kawasan Keramik dan Lingkungan Hidup  
Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Keramik dan Lingkungan Hidup  
Diklat  
Ruang dan Pengembangan Kawasan Keramik dan Lingkungan Hidup  
Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Keramik dan Lingkungan Hidup

5.000.000.000  
K.1/PA/2013 PERJUANGAN KAWASAN  
PERJUANGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA PADANG PANjang

MANAJEMEN RISIKO DAN PENGETAHUAN

WITA DESI SUMARTI ST  
NIP. 19741223 200313 5 005

EDDY AMRAH SIA



## PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG DINAS PERHUBUNGAN

Jln. Prof. Dr.HAMKA No. 87 TEL.(0752 ) 82051  
Kota Padang Panjang 27115

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : I PUTU VENDA, S.STP, M.Si

Jabatan : KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PADANG PANJANG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : FADLY AMRAN, BBA

Jabatan : WALIKOTA PADANG PANJANG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Padang Panjang, 11 Maret 2019



PEMERINTAH KOTA PAMANGAN  
DILAS PERHUBUNGAN

No. 945, Jl. G. H. MANSOOR No. 87, Telp (0352) 85025  
Kota Blitar, Jawa Timur 61118



PERATURAN PEMERINTAH KOTA

BAKU UNTUK PENGETAHUAN DAN PENGAMALAN  
DILAS PERHUBUNGAN KOTA PAMANGAN  
TENTANG

(PERATURAN PEMERINTAH KOTA PAMANGAN)

PERATURAN PEMERINTAH KOTA PAMANGAN

BAKU UNTUK PENGETAHUAN DAN PENGAMALAN

BAKU UNTUK PENGETAHUAN DAN PENGAMALAN

BAKU UNTUK PENGETAHUAN DAN PENGAMALAN

BAKU UNTUK PENGETAHUAN DAN PENGAMALAN  
DILAS PERHUBUNGAN KOTA PAMANGAN  
TENTANG

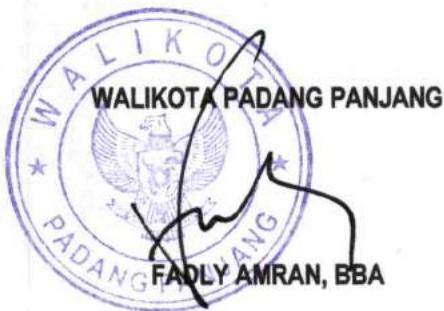
BAKU UNTUK PENGETAHUAN DAN PENGAMALAN  
DILAS PERHUBUNGAN KOTA PAMANGAN  
TENTANG



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**  
**DINAS PERHUBUNGAN**  
**KOTA PADANG PANJANG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Ketertiban Lalu Lintas	Jumlah Angka Kecelakaan	37
2	Meningkatnya Pelayanan Angkutan Jalan	- Persentase panjang trayek jalan - Persentase Kendaraan Lelos Uji KIR	27,02% 97,56%

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	202.730.000
2.	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	215.600.000
3.	Peningkatan Pelayanan Angkutan	825.719.500
4.	Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	598.750.000



PERINTAHAN KINERJA TAHUN 2016  
DILAKUKAN PERHIMPUNGAN  
KOTA PADANG PANANG

TARGET	MIMIKATOR KINERJA	SASARAN STRATEGI	OD
8	8	8	1
35	Tarikh Akhir Kedekkeran	Mewujudkan Persekitaran yang Ramah Lingkungan	2
51,05%	Pembentangan Kawasan Pesta Ullah	Mewujudkan Persekitaran yang Ramah Lingkungan	3
37,00%	Bentuk-pasang kerajaan Fazis Ullah	Mewujudkan Persekitaran yang Ramah Lingkungan	4

WINGARAN

R05 1,990,000  
S18,000,000  
S52,112,800  
R00 2,250,000

PROGRAM

Persekitaran yang Ramah Lingkungan dan Kelestarian Tanah Air  
Pembentangan Kawasan Pesta Ullah  
Parlimen Selangor  
Pembentangan Kawasan Pesta Ullah

Persatuan Projek Negeri Negeri Sembilan  
Negeri-Dinas PERHIMPUNGAN  
KOTA PADANG PANANG

LETSUT VERSA, 8,STR, MBI  
MP, 164005 Ipoh, Perak 4000

KOTA PADANG PANANG

ABU RAYA





## PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Sutan Syahrir No. 189, Telp/Fax. (0752) 83143  
Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat  
Kota Padang Panjang 27118

Website : [dukcapil.padangpanjang.go.id](http://dukcapil.padangpanjang.go.id) - Email: [disdukcapil@padangpanjang.go.id](mailto:disdukcapil@padangpanjang.go.id)

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. MAINI, MM  
Jabatan : KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KOTA PADANG PANJANG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : FADLY AMRAN, BBA  
Jabatan : WALIKOTA PADANG PANJANG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Padang Panjang, 11 Maret 2019

PIHAK PERTAMA  
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL

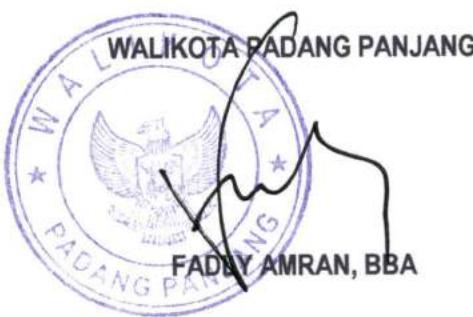
Dra. MAINI, MM  
NIP. 19640505 199003 2 007



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KOTA PADANG PANJANG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan	- Lama waktu pelayanan dokumen administrasi kependudukan	45 menit
		- Persentase penduduk yang memiliki dokumen administrasi kependudukan	85%
		- Persentase keakuratan data kependudukan	99.75%

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Penataan Administrasi Kependudukan	1,059,569,000
2.	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	191,000,000



BETALIJNEN KRIEGER TAHAN SOE  
SINGAPORENSIS BANK GAV BENGALEZATAN CINI  
HITA QADANG LIWAH ARA

NAME	TYPE	INDIVIDUAL KINETIC	INDIVIDUAL STARTUP	INDIVIDUAL
WILHELMUS	WILHELMUS	WILHELMUS	WILHELMUS	WILHELMUS
WILHELMUS	WILHELMUS	WILHELMUS	WILHELMUS	WILHELMUS
WILHELMUS	WILHELMUS	WILHELMUS	WILHELMUS	WILHELMUS

WILHELMUS  
WILHELMUS  
WILHELMUS  
WILHELMUS

WILHELMUS

WILHELMUS

WILHELMUS

WILHELMUS

WILHELMUS

WILHELMUS

WILHELMUS

WILHELMUS

WILHELMUS

WILHELMUS

WILHELMUS



## PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Prof. Dr. Hamka No. 87 Telp./Fax ( 0752 ) 82815 Padang Panjang 27114  
Email : [kominfo.kotapadangpanjang@gmail.com](mailto:kominfo.kotapadangpanjang@gmail.com)

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabilitas serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MARWILIS, SH, M.Si  
Jabatan : KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KOTA PADANG PANJANG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : FADLY AMRAN, BBA  
Jabatan : WALIKOTA PADANG PANJANG

Selaku Atasan Langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA  
WALIKOTA PADANG PANJANG  
  
FADLY AMRAN, BBA

Padang Panjang, 11 Maret 2019  
PIHAK PERTAMA  
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA  
  
MARWILIS, SH, M.Si  
NIP. 19610703 198203 1 008

WARMISCH, M.  
M.P. 19410701 198503 1 008

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**KOTA PADANG PANJANG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (E-Goverment)	Indeks SPBE	3%
2	Meningkatnya Penerapan Teknologi Informasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Persentase Penerapan Teknologi Informasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	25%
3	Meningkatnya diseminasi penerapan dan komunikasi publik terkait pembangunan daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Kualitas Layanan	70%
4	Meningkatnya kualitas pengelolaan, penyebaran informasi publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	70%
5	Terlaksananya pengamanan informasi pemerintah daerah	Indeks Keamanan Informasi	25%
6	Tersedianya data yang memenuhi standar satu data indonesia	Persentase data yang memenuhi standar satu data indonesia	25%

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1.	e-Goverment	7.990.214.000
2.	Pengembangan data, Informasi Statistik Sektoral	58.335.000
3.	Persandian dan Pengamanan Informasi	23.520.000
4.	Peningkatan Akses dan Kualitas Informasi Publik	2.388.755.325



Padang Panjang, 11 Maret 2019  
**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**KOTA PADANG PANJANG**



PERATURAN KINERJA TAHUN 2019  
DINA KOMUNITASI DAN INFORMASI  
KOTA PADANG PANjang

NO	KINERJA STRATEGIS	KINERJA OPERASIONAL	TARGET
1	Menyampaikan informasi dan berita kepada masyarakat dengan tepat dan akurat	Menyampaikan informasi dan berita kepada masyarakat dengan tepat dan akurat	50%
2	Pembangunan dan pengembangan teknologi informasi	Pembangunan dan pengembangan teknologi informasi	50%
3	Mewujudkan kinerja yang baik dalam pelaksanaan tugas dan fungsi	Mewujudkan kinerja yang baik dalam pelaksanaan tugas dan fungsi	50%
4	Mewujudkan kinerja yang baik dalam pelaksanaan tugas dan fungsi	Mewujudkan kinerja yang baik dalam pelaksanaan tugas dan fungsi	50%
5	Peningkatan kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi	Peningkatan kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi	50%
6	Peningkatan kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi	Peningkatan kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi	50%
7	Peningkatan kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi	Peningkatan kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi	50%
8	Peningkatan kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi	Peningkatan kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi	50%
9	Peningkatan kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi	Peningkatan kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi	50%
10	Peningkatan kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi	Peningkatan kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi	50%

ANGGARAN  
4.000.514.000  
28.332.000  
33.650.000  
5.389.125.000

KEPALA DINAS KOMUNITASI DAN INFORMASI  
KOTA PADANG PANjang  
HARLY AMRAN, S.Pd

NIP.1862031985031009  
#

PROGRAM  
e-Governement  
Pembangunan dan pengembangan teknologi informasi  
Peningkatan kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi  
Peningkatan kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi

WALIKOTA PADANG PANjang

HARLY AMRAN, S.Pd



**PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

JI. Sutan Syahrir Nomor 150 Silaing Bawah Telepon/Fax (0752) 485395  
Email: [dpmptsp\\_padangpanjang@yahoo.co.id](mailto:dpmptsp_padangpanjang@yahoo.co.id) Kode Pos: 27118

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : EWASOSKA, SH  
Jabatan : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : FADLY AMRAN,BBA  
Jabatan : WALIKOTA PADANG PANJANG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang Panjang, 11 Maret 2019  
**PIHAK PERTAMA**  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PIHAK KEDUA  
WALIKOTA PADANG PANJANG  
  
FADLY AMRAN,BBA

  
**EWASOSKA, SH**  
NIP. 19750103 200003 1 003

BELAYAN TERPADU SATU PINTU  
DILANS PENANDAMAN MODAL DAN  
PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

BER-JAHAN KINERJA TAHUN 2018

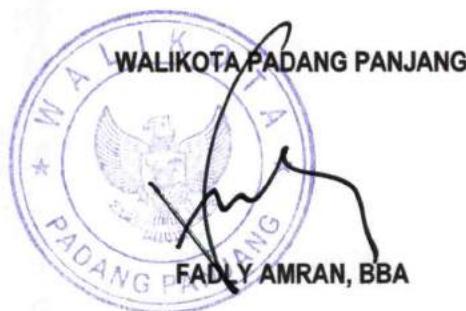
DAN BEI AYANNI TERPABD SATU PINTA  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL

NMB 18250013 S00003 1 003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KOTA PADANG PANJANG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Persentase Peserta Pelatihan Yang Ditempatkan	30%
2	Meningkatnya Nilai Investasi	Pertambahan Nilai Investasi Swasta	20 M
3	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	84%

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Peningkatan Kesempatan Kerja	133.467.500
2.	Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	294.150.000
3.	Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	38.939.500



Padang Panjang, 11 Maret 2019  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 KOTA PADANG PANJANG**

  
**EWASOSKA, SH**  
 NIP. 19750103 200003 1 003

DELEGASI KINERJA TAHUN 2016  
DAN PERILAKUAN MUSLIM DAN PELAKU KINERJA

TARGET	MID-TARGET KINERJA	GARISAN STRATEGIS	OJ
8	8	8	7
50%	Pelaksanaan pelajaran Yudik dilaksanakan	Pelaksanaan pelajaran Yudik dilaksanakan	7
80%	Kelengkapan NHTI danسائل pendidikan	Kelengkapan NHTI danسائل pendidikan	5
90%	Untuk mendukung pelaksanaan pelajaran	Untuk mendukung pelaksanaan pelajaran	7

ANGGARAN

Rp39.987.600

Rp41.125.000

Rp6.088.88

ANGGARAN

Rp39.987.600

Rp41.125.000

Rp6.088.88

KEPALA DINAS PENGETAHUAN DAN PELAKUAN KINERJA  
DAN PERILAKUAN MUSLIM DAN PELAKU KINERJA  
KOTAT PAGONG PANJANG

EWA SORINA SH  
NIP. 19820107 200003 1 003

WILAYAH PAGONG PANJANG

PADA TAHUN 2016



## PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG DINAS PARIWISATA

Komplek Pusat Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan Minangkabau (PDIKM)  
Silaing Bawah Telepon/Fax. (0752) 84164 Padang Panjang

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HENDRI FAUZAN, AP.M.Si

Jabatan : KEPALA DINAS PARIWISATA KOTA PADANG PANJANG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : FADLY AMRAN, BBA

Jabatan : WALIKOTA PADANG PANJANG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



# BEREINIHAT KOTA PADANG PANJANG DINA'S PARIMISATA



Surat Perintah Dinas Parimisata  
Kota Padang Panjang (Dinas Parimisata)

## BERAHLAHAN KINERJA TAHUN SERTA

Surat Perintah Dinas Parimisata  
Kota Padang Panjang (Dinas Parimisata)

Perihal Pengesahan dan Jasa Bantuan Penerjemah

Nomor : 001/PER/DINAPAR/2018

Tanggal : 10 Januari 2018

Surat Perintah Dinas Parimisata

Nomor : 001/PER/DINAPAR/2018

Tanggal : 10 Januari 2018

Surat Perintah Dinas Parimisata

Surat Perintah Dinas Parimisata  
Kota Padang Panjang (Dinas Parimisata)

Surat Perintah Dinas Parimisata  
Kota Padang Panjang (Dinas Parimisata)

Surat Perintah Dinas Parimisata  
Kota Padang Panjang (Dinas Parimisata)

Surat Perintah Dinas Parimisata  
Kota Padang Panjang (Dinas Parimisata)

Surat Perintah Dinas Parimisata  
Kota Padang Panjang (Dinas Parimisata)

Surat Perintah Dinas Parimisata  
Kota Padang Panjang (Dinas Parimisata)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**  
**DINAS PARIWISATA**  
**KOTA PADANG PANJANG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan	Jumlah Kunjungan wisatawan	655.841 orang

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	2.385.225.000
2.	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	2.664.316.000
3.	Program Pengembangan Kemitraan	197.199.000
4.	Program Pengembangan Objek Wisata Unggulan	767.110.000



BERATANAN KERJA DAN TAHUN 2018

GRAND PAPUA MARATUA

KOTA PADANG PANANGKAN

TARGET	INDIKATOR KINERJA	SASARAN STAKEHOLDER	OJ
RPT SPP 2018	penilaian kinerja warga negara	Warga negara yang tinggal di Maratua dan Padangpanjang	1

ANGGARAN

5.282.222.000

3.995.316.000

1.287.398.000

000.000.000

810  
Berdasarkan Rancangan APBN  
KEPALA DINAS PUPR MARATUA  
KOTA PADANG PANANGKAN

HEMURUANAN APBN  
NIRI 197.000.000.000

MAROPI

5.282.222.000  
3.995.316.000  
1.287.398.000  
000.000.000

PROSES PADA DILAKUKAN

ABY. AMARIA ABY



## PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jln. Urip Sumoharjo No. 532 Padang Panjang Kode Pos 27128

Telp. ( 0752 ) 485312 Fax. (0752) 485312

Email: [kpad.padangpanjang@gmail.com](mailto:kpad.padangpanjang@gmail.com) – website: [www.padangpanjangkota.go.id](http://www.padangpanjangkota.go.id)

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ALVISENA, ST. MT

Jabatan : KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA PADANG PANJANG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

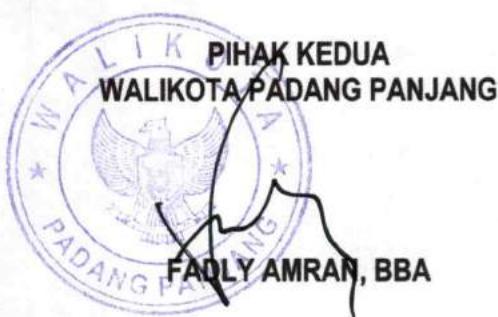
Nama : FADLY AMRAN, BBA

Jabatan : WALIKOTA PADANG PANJANG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Padang Panjang, 11 Maret 2019  
**PIHAK PERTAMA**  
**KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN**  
**KEARSIPAN**



DEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG  
DILAKUKAN DAN KEGIATAN

Jl. Dr. Soeharto No. 235, Kecamatan Padang Panjang  
Telp. (0362) 425232 Fax. (0362) 425232  
Email : [kotapadangpanjang@indra.co.id](mailto:kotapadangpanjang@indra.co.id)



PERIZAHAN KURIAH TAHUN 2008

Untuk mendukung dan memenuhi kebutuhan masyarakat dalam mendukung pembangunan di wilayahnya

dan mendukung pembangunan di wilayahnya

PT. KARISIEN STMT

KEPERIZAHAN DINAS PERIZAHAN DAN KEGIATAN PADANG PANJANG

Sebagaimana di UU KAHK

PT. KARISIEN STMT

DILAKUKAN DAN KEGIATAN

Untuk mendukung dan memenuhi kebutuhan masyarakat dalam mendukung pembangunan di wilayahnya

dan mendukung pembangunan di wilayahnya

PT. KARISIEN STMT

PT. KARISIEN STMT  
DILAKUKAN DAN KEGIATAN PADANG PANJANG

NIP. 1012082500121004  
PT. KARISIEN STMT

PT. KARISIEN STMT  
DILAKUKAN DAN KEGIATAN

PT. KARISIEN STMT

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**  
**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**  
**KOTA PADANG PANJANG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya kunjungan perpustakaan	Jumlah pengunjung perpustakaan	23.400 Orang
2	Meningkatnya penyelenggaraan kearsipan	Jumlah pencipta arsip yang melaksanakan kearsipan sesuai prosedur yang ditetapkan	20 Pencipta Arsip

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Program Pengembangan Budaya baca dan Pembinaan Perpustakaan	2.493.971.000
2.	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	422.897.000



PERIHAMIN KINERJA TAHUN 2019  
DINA'S BERHUSADAAN DAN KERASIRAN  
KOTA PADANG PANJANG

TARGET	INDIKATOR KINERJA	SARAPAN STRATEGIS	NO
25.900 Orang	Jumlah penduduk yang mendapat pangan	1. Waduk Sipin, Jl. Jalan Padatapung	1
50 Penduduk Atas	Jumlah penduduk yang mendapat pangan	2. Mampang, Jl. Jalan Padatapung	2

ANGGARAN  
0.103.811.000  
525.000.000

PROGRAM  
J. Proses Pengolahan Bahan Pangan Pada Pabrikasi dan Produksi  
B. Produksi dan Pengolahan Bahan Pangan Dikoturnya dan Dasiha

KELLA DINAS BERHUSADAAN DAN KERASIRAN  
KOTA PADANG PANJANG  
Papandayan, 17 Nopember 2019  
http://laporan25005121.000

KATA KATA PADANG PANJANG

DR. AMRAN, MM



## PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

Jl. Ahmad Yani No. 30 Kelurahan Ngalau Padang Panjang Timur  
Kota Padang Panjang Kode Pos 27124. Telp./Fax (0752) 82119.

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SYAH DANUR, SH. MM

Jabatan : KEPALA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN KOTA PADANG PANJANG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : FADLY AMRAN, BBA

Jabatan : WALIKOTA PADANG PANJANG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA  
WALIKOTA PADANG PANJANG  
FADLY AMRAN, BBA

Padang Panjang, 11 Maret 2019  
PIHAK PERTAMA  
KEPALA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN  
SYAH DANUR, SH. MM  
NIP. 19640815 199003 1 009

# EMERGENCY FUNDING FOR MIGRATION IN PANAMA

Ministry of Foreign Affairs - Panama  
Ministerio de Relaciones Extranjeras - Panamá  
Tel: +507 229 0000 | Fax: +507 229 0001 | Email: [relaciones@minrex.gob.pa](mailto:relaciones@minrex.gob.pa)



## EMERGENCY NUMBER 1000

Emergency Number 1000 is available 24 hours a day, 7 days a week, throughout the country. It is a toll-free number that can be used from anywhere in the country.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTRANJERAS

MIGRATION IN PANAMA

## EMERGENCY NUMBER 1000

MINISTERIO DE RELACIONES EXTRANJERAS

MIGRATION IN PANAMA

Emergency Number 1000 is available 24 hours a day, 7 days a week, throughout the country.

Emergency Number 1000 is available 24 hours a day, 7 days a week, throughout the country. It is a toll-free number that can be used from anywhere in the country. It is a toll-free number that can be used from anywhere in the country.

Emergency Number 1000 is available 24 hours a day, 7 days a week, throughout the country. It is a toll-free number that can be used from anywhere in the country. It is a toll-free number that can be used from anywhere in the country.

Emergency Number 1000 is available 24 hours a day, 7 days a week, throughout the country.

Ministry of Foreign Affairs - Panama

MINISTERIO DE RELACIONES EXTRANJERAS

MIGRATION IN PANAMA

Ministry of Foreign Affairs - Panama

MINISTERIO DE RELACIONES EXTRANJERAS

MIGRATION IN PANAMA

Ministry of Foreign Affairs - Panama

MINISTERIO DE RELACIONES EXTRANJERAS

MIGRATION IN PANAMA

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**  
**DINAS PANGAN DAN PERTANIAN**  
**KOTA PADANG PANJANG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Konsumsi Pangan Masyarakat Sesuai Kaidah B2SA (Beragam Bergizi Seimbang dan Aman)	Skor Pola pangan Harapan (PPH)	85
2	Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat Untuk Layanan : kesehatan Hewan, Pemotongan Hewan, Penyediaan Benih Ikan, Pembesaran Anak Sapi, Penyakit Hama dan Tanaman	Skor Indeks Kepuasan Masyarakat	77
3	Peningkatan Produktivitas Sektor Pertanian dan Perikanan	- Produktivitas Perternakan/Produk Peternakan - Produksi Budidaya Perikanan - Produktivitas Padi - Persentase Terbentuknya Klaster Tanaman Hias	10,10 Liter/Ekor/Hari 650 Ton 5,70 Ton/Ha 5%

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Peningkatan Ketahanan Pangan	882.304.800
2.	Pengembangan Budidaya Perikanan	590.609.000
3.	Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian dan Perkebunan	1.783.728.000
4.	Peningkatan Kesejahteraan Petani	74.999.800
5.	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan	307.565.000
6.	Peningkatan Produksi Hasil Pertanian	1.973.464.300



Padang Panjang, 11 Maret 2019  
**KEPALA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN**  
**KOTA PADANG PANJANG**

**SYAHDAHUR, SH. MM**  
**NIP. 19640815 199003 1 009**

**GERJAHAN KEMERIAHAN  
DENGAN DAN PERATURAN  
ATO'S DENGAN PADA**

TARGET	MOTORIK	KOGNITIF	SOCIAL	OM
A	B	C	D	E
88	87.4% pada kategori C dan D	87.4% pada kategori C dan D	86.7% pada kategori C dan D	86.7% pada kategori C dan D
11	93.8% pada kategori C dan D			
10	90.0% pada kategori C dan D			
90.0% 90.0%	90.0% pada kategori C dan D			
100.0% 100.0%	100.0% pada kategori C dan D			
98	100.0% pada kategori C dan D			

**ANGGARAN**

108.308.000  
880.000.000  
200.250.000  
100.000.000  
100.000.000  
90.000.000

**MATERI**

100.000.000 pada kategori C dan D  
500.000.000 pada kategori C dan D  
100.000.000 pada kategori C dan D

PADA RUMAH  
DENGAN DAN PERATURAN  
ATO'S DENGAN PADA

DENGAN DAN PERATURAN  
ATO'S DENGAN PADA

SAYAHADUAN  
100.000.000

KODIYAMANA SAY



**PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG**  
**DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA**  
**KECIL DAN MENENGAH**

Jln. St. Syahrir No. 124 Telp. (0752) - 82243 Fax (0752) - 82243 PADANG PANJANG - 27118

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARPAN, SH

Jabatan : KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH  
KOTA PADANG PANJANG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : FADLY AMRAN, BBA

Jabatan : WALIKOTA PADANG PANJANG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Padang Panjang, 11 Maret 2019

**PIHAK PERTAMA**  
**KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI,**  
**USAHA KECIL DAN MENENGAH**  
**KOTA PADANG PANJANG**

NIP. 19611111 198603 1 018

PERMINTAH KOTA PADANG PANANG  
DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAMA  
KECIL DAN MENENGAH



PERINTAH KINERJA TAHUN 2019

Dinas Perdagangan Koperasi Usama Kecil dan Menengah  
berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Koperasi  
dan Perdagangan Kecil dan Menengah, dan  
Menengah  
Kepala Dinas Perdagangan Koperasi Usama Kecil dan Menengah  
Kota Padang Panjang

Sebagaimana dijelaskan dalam PERINTAH

ABDIY AMRAN BBA

WALINTA PADANG PANANG

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diberikan berdasarkan  
peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah  
dalam rangka meningkatkan kinerja dan kelayakan  
koperasi dan perdagangan kecil dan menengah  
dengan memenuhi standart nasional  
PINKI NUGRAHA selaku wakil wali kota padang panjang  
berdasarkan catatan kinerja dan pelaksanaan jatah diberikan  
pada perintah ini berlaku pada tanggal

Pada Jumat, 11 Oktober 2019

PINKI HERMATA  
KEPALA DINAS PERDAGANGAN KOPERASI  
USAMA KECIL DAN MENENGAH  
KOTA PADANG PANANG

ABDIY AMRAN BBA  
WALINTA PADANG PANANG

PINKI HERMATA  
WALINTA PADANG PANANG

ABDIY AMRAN BBA

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**  
**DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH**  
**KOTA PADANG PANJANG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Produktivitas Sektor Perdagangan	Persentase Kenaikan Nilai Volume Perdagangan	7,91
2	Meningkatnya Produktivitas Sektor Industri	Persentase Peningkatan Produktivitas Industri Kecil Menengah	1,37
3	Meningkatnya Koperasi Aktif Berpola Syariah	Persentase Koperasi Aktif Berpola Syariah	37,50
4	Meningkatnya Skala Usaha Mikro Kecil	Persentase Peningkatan Skala Usaha Usaha Mikro Kecil	0,51
5	Mengurangi Kemiskinan di Sektor Usaha Mikro Kecil	Persentase Angka Kemiskinan di Sektor Usaha Menengah Kecil	51,5
6	Menumbuhkan Wirausahawan Baru	Persentase Pertumbuhan Wirausahawan Baru	0,71

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM	Rp 1.469.950.000
2.	Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM	Rp 467.000.000
3.	Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Rp 734.340.000
4.	Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Rp 2.458.863.000
5.	Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri	Rp 197.545.000
6.	Pengembangan Industri Kecil Menengah	Rp 1.343.544.000
7.	Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	Rp 720.070.000







## PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Jl. Prof M. Yamin, SH No. 02 Padang Panjang, Telp/Fax (0752) 484809  
Email:polpppadangpanjang@gmail.com - Website:www.padangpanjangkota.go.id

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARKES REFAGUS, S.Sos

Jabatan : KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN  
KOTA PADANG PANJANG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : FADLY AMRAN, BBA

Jabatan : WALIKOTA PADANG PANJANG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA  
WALIKOTA PADANG PANJANG  
  
FADLY AMRAN, BBA

Padang Panjang, 11 Maret 2019  
PIHAK PERTAMA  
KEPALA SATPOL PP DAN PEMADAM  
KEBAKARAN

ARKES REFAGUS, S.Sos  
NIP. 19651112 198602 1 002

# PERMINTAAN KOTAK PANDUAN GATAN ROLI PAMONG PRADA DAN PEMADAM KEBAKARAN



Surat ini merupakan surat resmi yang ditulis pada hari ini di Jakarta, pada tanggal 10 Mei 2018. Tujuan surat ini adalah untuk memberikan informasi dan panduan mengenai kota gatan rolis pamong prada dan pemadam kebakaran.

## MERINTAHAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam surat ini, kami akan memberikan penjelasan tentang tujuan dan sifat-sifat kota gatan rolis pamong prada dan pemadam kebakaran. Selain itu, kami juga akan memberikan petunjuk dan panduan dalam mengelola kota gatan rolis pamong prada dan pemadam kebakaran.

AMALIYE DAN KINERJA DILAKUKAN DI SETIAP

ABDI MASYARAKAT DAN KINERJA

BERJALAN DALAM KONSEP KINERJA

Kota gatan rolis pamong prada dan pemadam kebakaran memiliki tujuan utama untuk melindungi masyarakat dari bahaya kebakaran dan banjir. Selain itu, mereka juga bertujuan untuk memastikan bahwa lingkungan tetap bersih dan sehat. Dalam melaksanakan tugasnya, mereka menggunakan berbagai teknologi dan metode terbaru. Misalnya, mereka menggunakan sistem deteksi dini yang dapat mendekati kebakaran sebelumnya. Selain itu, mereka juga dilengkapi dengan alat-alat canggih seperti kendaraan pemadam kebakaran yang dilengkapi dengan sistem pompa air yang kuat.

PERINTAHAN KOTAK PANDUAN  
GATAN ROLI PAMONG PRADA  
DAN PEMADAM  
KEBAKARAN

PERINTAHAN KOTAK PANDUAN  
GATAN ROLI PAMONG PRADA

AKSES REFERENSI  
NIP. 10001113198801005

AKSES REFERENSI

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA PADANG PANJANG**  
**KOTA PADANG PANJANG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya ketiaatan masyarakat terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	- Persentase Penegakan Perda	97%
2	Meningkatnya peran dan fungsi perlindungan masyarakat	- Persentase Pemberdayaan Petugas Satlinmas	100%
3	Meningkatnya cakupan pelayanan penanganan bahaya kebakaran	- Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate)	100%

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	4.558.679.000
2.	Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	520.962.000
3.	Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	1.940.280.000



Padang Panjang, 11 Maret 2019  
**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
DAN PEMADAM KEBAKARAN  
KOTA PADANG PANJANG**

ARKES REPAGUS, S. Sos  
NIP. 19651112 198602 1 002

PENGARUH KIMERIA TAHUN 5016

GATUAN DULI SAMONG PRATA DAN PEMADAM KERAMARUIN KOTA PADANG PANJING

KOTA PADANG PANJING

TARGET	DIKATAKAN KONSEP	SIMPAN STRATEGI	OB
4	3	3	1
500	5. Penerapan Sistem Pengelolaan Lingkung	Menurunkan kisaran pembakaran dan pengembangan teknologi yang efektif dan efisien	7
1000	6. Mewujudkan Lingkungan yang sehat dan nyaman	Mewujudkan lingkungan yang nyaman dan sehat	2
1000	7. Mengelola limbah dengan baik	Mengelola limbah dengan baik dan benar	3

AMGARAN

200  
4.500.000  
250  
5.000.000  
1.000.000

MBOKAWA

5. Pembangunan dan pengembangan teknologi yang efektif dan efisien  
6. Pengelolaan lingkungan yang nyaman dan sehat  
7. Pengelolaan limbah dengan baik dan benar

NO

5  
5  
6

Pada tahun 2016, jumlah 11 Maret 5016

IGELLA GATUAN DULI SAMONG PRATA  
MAN KOTA PADANG PANJING

VIRUS REKAUNG 3.800  
HP. 1628125.0000.774

WALIDOTO PADANG PANJING



WALIDOTO  
PADANG PANJING



# PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 4 Telp. (0752) 83147-83148 Fax 484623 Padang Panjang  
Email: [kominfo.pdgpanjang@gmail.com](mailto:kominfo.pdgpanjang@gmail.com) – Website: [www.padangpanjangkota.go.id](http://www.padangpanjangkota.go.id)

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SONNY BUDAYA PUTRA, AP, M.Si  
Jabatan : KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : FADLY AMRAN, BBA  
Jabatan : WALIKOTA PADANG PANJANG

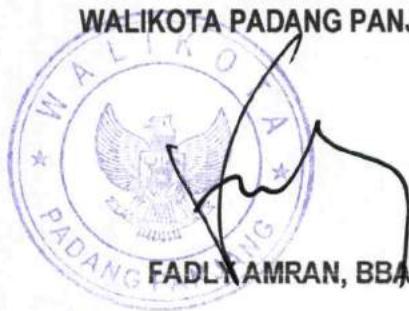
Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang Panjang, 11 Maret 2019

PIHAK KEDUA  
WALIKOTA PADANG PANJANG



PIHAK PERTAMA  
KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN  
DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
KOTA PADANG PANJANG



SONNY BUDAYA PUTRA, AP, M.Si  
NIP. 19750331 199501 1 001

# KOTA PADANG PANTAI DAN PENGETAHUAN DAEWAH



BERSAMA-SAMA KITA MEMERINTAH KOTA PADANG PANTAI  
BERENCANA DAN PENGEMBANGAN DAEWAH

## PERJALANAN KERJA LAJU UNIK

“... dan yang terpenting adalah kita tidak pernah lupa untuk selalu berusaha mencari dan menemukan hal-hal baru yang belum pernah kita temui sebelumnya. Kita juga selalu berusaha untuk memperbaiki diri dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kita agar bisa memberikan yang terbaik bagi orang-orang yang kita tanggung jawab.”

SEJARAH KERJA LAJU UNIK

AKTIVITAS KERJA LAJU UNIK

KEGIATAN KERJA LAJU UNIK

“... dan yang terpenting adalah kita tidak pernah lupa untuk selalu berusaha mencari dan menemukan hal-hal baru yang belum pernah kita temui sebelumnya. Kita juga selalu berusaha untuk memperbaiki diri dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kita agar bisa memberikan yang terbaik bagi orang-orang yang kita tanggung jawab.”

“... dan yang terpenting adalah kita tidak pernah lupa untuk selalu berusaha mencari dan menemukan hal-hal baru yang belum pernah kita temui sebelumnya. Kita juga selalu berusaha untuk memperbaiki diri dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kita agar bisa memberikan yang terbaik bagi orang-orang yang kita tanggung jawab.”

“... dan yang terpenting adalah kita tidak pernah lupa untuk selalu berusaha mencari dan menemukan hal-hal baru yang belum pernah kita temui sebelumnya. Kita juga selalu berusaha untuk memperbaiki diri dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kita agar bisa memberikan yang terbaik bagi orang-orang yang kita tanggung jawab.”

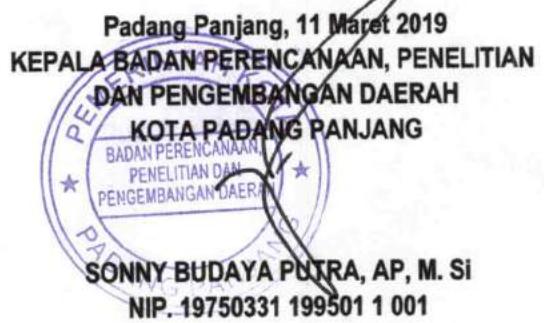
“... dan yang terpenting adalah kita tidak pernah lupa untuk selalu berusaha mencari dan menemukan hal-hal baru yang belum pernah kita temui sebelumnya. Kita juga selalu berusaha untuk memperbaiki diri dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kita agar bisa memberikan yang terbaik bagi orang-orang yang kita tanggung jawab.”

“... dan yang terpenting adalah kita tidak pernah lupa untuk selalu berusaha mencari dan menemukan hal-hal baru yang belum pernah kita temui sebelumnya. Kita juga selalu berusaha untuk memperbaiki diri dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kita agar bisa memberikan yang terbaik bagi orang-orang yang kita tanggung jawab.”

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**  
**BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**  
**KOTA PADANG PANJANG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase Rata-Rata Ketercapaian Sasaran Daerah	75%

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Program Pengembangan Data dan Informasi	133.399.800
2.	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	144.174.500
3.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	973.411.700
4.	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	16.014.800
5.	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	275.046.300
6.	Program Penelitian dan Pengembangan	1.515.900.100
7.	Program Penguanan Inovasi Daerah	46.330.000







**PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG**  
**DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK**  
**KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN**  
**PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jl. Anas Karim No. 14 Pasar Usang Telp. (0752) 83487 Padang Panjang

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MARTONI, S. Sos, M. Si

Jabatan : KEPALA DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PADANG PANJANG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : FADLY AMRAN, BBA

Jabatan : WALIKOTA PADANG PANJANG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Padang Panjang, 11 Maret 2019  
**PIHAK PERTAMA**  
**KEPALA DINAS PPKB PPPA**

MARTONI, S. Sos, M. Si  
NIP. 197303041993081001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**  
**DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**  
**DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PADANG PANJANG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatkan cakupan PJMKS yang mendapatkan pelayanan sosial	Persentase PMKS yang tertangani	45,00%
2	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan	Persentase Lembaga Sosial Kemasyarakatan yang Aktif	70%
3	Meningkatkan pemenuhan anak	Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Madya
4	Meningkatkan pemberdayaan perempuan	Predikat APE	Pratama
5	Meningkatkan pelayanan kependudukan dan keluarga berencana	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2,40%

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	608.583.500
2.	Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	996.465.000
3.	Rehabilitasi Sosial Korban Bencana	150.000.000
4.	Pembinaan Anak Terlantar	30.775.000
5.	Pembinaan Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	99.505.000
6.	Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	677.282.000
7.	Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	341.525.000
8.	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	343.904.000
9.	Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan	250.800.000
10.	Peningkatan kelembagaan masyarakat kelurahan	2.186.607.000
11.	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	274.895.000
12.	Peningkatan pemberdayaan kelembagaan adat	604.800.000
13.	Keluarga Berencana	2.601.887.000
14.	Kesehatan Reproduksi Remaja	322.145.000
15.	Pelayanan Kontrasepsi	62.500.000
16.	Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang mandiri	213.986.000
17.	Peningkatan pengendalian penduduk	60.125.000



Padang Panjang, 11 Maret 2019  
**KEPALA DINAS PPKB PPPA**  
**KOTA PADANG PANJANG**

MARTONI, S. Sos, M. Si  
NIP.19730304 199308 1 001

PERMANENZA KINERJA TAHUN 2019  
DENGAN SOSIAL ENGENDRALAN PERINDUSTRIAN BERENCANAAN PENSADAYAAN PERSEMPTIAN  
DAN PERILUUNGAN VAKAN KOTA PADANG PANJANG

NO	TARAF	MINGKATOR HINDERA	SASARAN STRATEGIS
1	4	Pada masa PMK yang berjalan	Menyelenggarakan pelajaran dan pembelajaran dalam bentuk kelas tatap muka
2	5	Kemajuan teknologi dan teknik	Menyelenggarakan pelajaran dan pembelajaran dalam bentuk kelas tatap muka
3	6	Tujuan Ciptanya Kita Tidak Jauh	Menyelenggarakan pelajaran dan pembelajaran dalam bentuk kelas tatap muka
4	7	Kelebihan ABE	Menyelenggarakan pelajaran dan pembelajaran dalam bentuk kelas tatap muka
5	8	Rasanya tidak banyak hal penting	Menyelenggarakan pelajaran dan pembelajaran dalam bentuk kelas tatap muka

PROGRAM	NO	ANGGARAN
Program Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana (PKBK), pindah	1	808.983.500
Pembangunan Infrastruktur dan Perbaikan Infrastruktur	2	30.254.800
Pembangunan Infrastruktur dan Perbaikan Infrastruktur	3	30.010.000
Pembangunan Infrastruktur dan Perbaikan Infrastruktur	4	30.115.000
Pembangunan Infrastruktur dan Perbaikan Infrastruktur	5	38.985.000
Pembangunan Infrastruktur dan Perbaikan Infrastruktur	6	500.535.578
Pembangunan Infrastruktur dan Perbaikan Infrastruktur	7	341.818.000
Pembangunan Infrastruktur dan Perbaikan Infrastruktur	8	340.406.000
Pembangunan Infrastruktur dan Perbaikan Infrastruktur	9	300.800.000
Pembangunan Infrastruktur dan Perbaikan Infrastruktur	10	1.151.901.100
Pembangunan Infrastruktur dan Perbaikan Infrastruktur	11	327.822.000
Pembangunan Infrastruktur dan Perbaikan Infrastruktur	12	80.817.000
Pembangunan Infrastruktur dan Perbaikan Infrastruktur	13	570.198.000
Pembangunan Infrastruktur dan Perbaikan Infrastruktur	14	202.169.000
Pembangunan Infrastruktur dan Perbaikan Infrastruktur	15	600.000.000
Pembangunan Infrastruktur dan Perbaikan Infrastruktur	16	213.985.000
Pembangunan Infrastruktur dan Perbaikan Infrastruktur	17	60.152.000

Pembangunan Perindustrian dan Pengembangan  
Kota Padang Panjang

MANTAP PADANG PANJANG

MARTONI, S.Pd., M.M.  
NIP. 19730201 199308 1 001

RACHYAMARIAH, S.Pd.



## PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Jl. Sutan Syahrir No. 178 Telp. ( 0752 ) 485152 Fax. ( 0752 ) 485152  
Padang Panjang 27118

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : INDRA GUSNADY, SE, M.Si

Jabatan : KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH  
KOTA PADANG PANJANG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : FADLY AMRAN, BBA

Jabatan : WALIKOTA PADANG PANJANG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Padang Panjang, 11 Maret 2019  
**PIHAK PERTAMA**  
**KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN**  
**DAERAH KOTA PADANG PANJANG**

**INDRA GUSNADY, SE, M.Si**  
Nip. 19700804 199803 1 006

PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG  
BAGIAN PENGETAHUAN KEUANGAN DAERAH  
Jl. Gajah Mada No.158 Telp. (0325 / 482125 Fax. (0325) 482128  
Babatan Padang Panjang 57118



## BERITAMINISTERIATAHUN2010

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi dalam menjalankan pembangunan daerah, pada hari ini  
BAGIAN PENGETAHUAN KEUANGAN DAERAH  
MEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG  
MELAKUKAN PEMERIKSAAN TERhadap  
BAGIAN PENGETAHUAN KEUANGAN DAERAH  
KOTA PADANG PANJANG

Sejauh ini, hasil pelaksanaan  
TAHUN ANGARAH 2009  
DAPAT DILAKUKAN PADA

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menjalankan pembangunan daerah, BAGIAN PENGETAHUAN KEUANGAN DAERAH  
KOTA PADANG PANJANG  
telah berusaha mencapai tujuan yang diinginkan dengan  
memperbaiki dan memperkuat sistem pengelolaan keuangan  
daerah dan meningkatkan kinerja administrasi  
dengan mengintegrasikan teknologi informasi dan  
meningkatkan keterbukaan dan transparansi dalam  
pelaksanaan tugas dan fungsi.

BAGIAN PENGETAHUAN KEUANGAN DAERAH  
KOTA PADANG PANJANG  
MEMERIKSA BAGIAN PENGETAHUAN KEUANGAN  
DAERAH KOTA PADANG PANJANG

INDRA GSANDY 36,WI  
NIP.19700410803 2 000

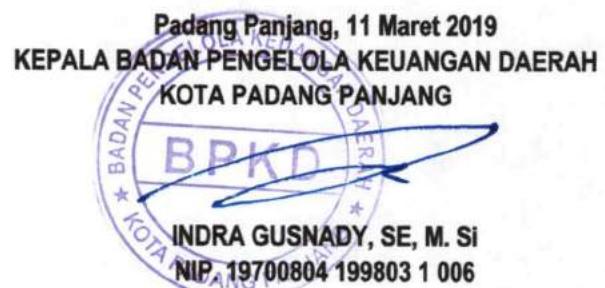
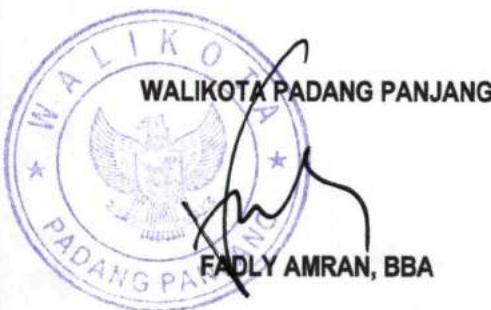
FIRHAK NUGRAHA  
VII/2010

ADY SUMARNO

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**  
**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH**  
**KOTA PADANG PANJANG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Ketetapan Penyajian Laporan Keuangan Sesuai SAP	Tepat Waktu
2	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan PAD	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	5%

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Peningkatan Pengelolaan Penganggaran Daerah	1.047.876.000
2.	Peningkatan dan Pengembangan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	470.310.600
3.	Peningkatan dan Pengembangan BMD	273.568.000
4.	Peningkatan Pajak dan Retribusi Daerah	1.627.200.000



PERJANJALIA KIMERA TAHUN SENE  
BAGIAN PENGELOLA KEMANGAN DAEJAH  
KOTA PADANG PINTUNG

TARGET	INDIKATOR KINERJA	KASARAH STRATEGI	NO
Tujuan Masa Depan	Kinerja pada pekerjaan S&P /Sekelompok Pekerjaan Laporan	Waktu pelaksanaan dan kualitas pelaksanaan	1
2020	Penerapan Rancangan Pengembangan Yaitu JPP	Bentuk dan kualitas pelaksanaan di TAH	2

ANGGARAN  
DITURAPAN  
RHO 30.000  
2.500.000  
000.000.1

PERJANJALIA KIMERA TAHUN SENE  
BAGIAN PENGELOLA KEMANGAN DAEJAH  
KOTA PADANG PINTUNG

12. M. ARMANDY QE. M. SI  
NIP. 120004198001000

MARDI  
Penyelesaian dan pelaksanaan  
Pembangunan dan pengembangan  
Pembangunan dan pengembangan  
Tahap awal  
Pembangunan dan pengembangan

MANAJEMEN DAN RUMAH

EDDY ARMADI BBA



# PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

## BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Jln. Prof. M.Yamin, SH No. 88 Padang Panjang kode pos 27118  
Telp. (0752) 82024 - Fax . (0752) 82024  
Email : [bkpsdm@padangpanjang.go.id](mailto:bkpsdm@padangpanjang.go.id) – Website: [www.padangpanjang.go.id](http://www.padangpanjang.go.id)

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HENDRA PUTRA, S.ST, MT  
Jabatan : Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER  
DAYA MANUSIA KOTA PADANG PANJANG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : FADLY AMRAN, BBA  
Jabatan : WALIKOTA PADANG PANJANG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**  
**KOTA PADANG PANJANG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kinerja Aparatur	Indeks Profesionalisme ASN	69

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp 663.675.000
2.	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Rp 1.492.747.500
3.	Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah	Rp 39.872.500
4.	Pendidikan Kedinasan	Rp 649.000.000







**PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA**  
**DAERAH, KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

JLN. KH. Ahmad Dahlan No.5 ( 0752 ) 82847 Guguk Malintang, Padang Panjang  
Email : Bpbd.kesbangpol.pp@gmail.com

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. ERIZAL, M.Si

Jabatan : KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH, KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PADANG PANJANG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : FADLY AMRAN, BBA

Jabatan : WALIKOTA PADANG PANJANG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



PERMERINTAH KOTA PADANG PANJANG  
BADAN PENGGULANGAN BENCANA  
DARAH,KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



Jl. H. R. Natsir Nomor 26 (0362) 741569 - Bandung  
Email: bpd@bandung.go.id

PERMINTAAN KIRIMAN SURAT

Dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi BPDK, pada hari ini dipersiapkan surat berikut ini.

Surat ini ditujukan kepada :

1. MASA BADAN PENGGULANGAN BENCANA DARAH, KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Sebagai berikut :

1. BPDK

2. MASA BADAN PENGGULANGAN BENCANA DARAH, KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Sebagaimana diberitahukan dalam surat ini, bahwa BPDK akan mengadakan seminar internasional bertajuk "PERENCANAAN DAN PEMERINTAHAN DALAM KEMERDEKAAN INDONESIA". Seminar ini akan dilaksanakan pada tanggal 10-11 Mei 2003 di Bandung. Untuk memenuhi kebutuhan seminar ini, maka dibutuhkan sejumlah peserta yang akan menghadiri seminar ini.

Berdasarkan surat ini, kami mengajukan permohonan agar BPDK memberikan izin untuk menghadiri seminar ini. Kami berharap agar BPDK dapat memberikan respon positif terhadap permohonan ini.

Demikian permohonan ini, terimakasih.

Pada hari Selasa, 11 Mei 2003

RIBAK PERATAMA  
KEPALA BADAN PENGGULANGAN  
BENCANA DARAH, KESATUAN BANGSA  
DAN POLITIK KOTA PADANG PANJANG

Surat ini ditulis pada tanggal

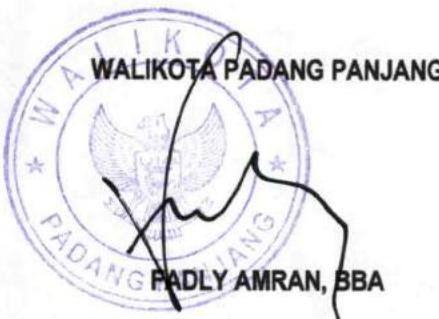
PERMINTAAN KIRIMAN SURAT

ANITA AMYRA

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA, KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**KOTA PADANG PANJANG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya manajemen penanggulangan bencana	Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana	50%
2	Meningkatnya kualitas keamanan dan kerukunan hidup di masyarakat	Persentase Penurunan kejadian konflik sosial	5%

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	1.756.381.000
2	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	116.730.000
3	Program Peningkatan dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	160.313.400
4	Program Peningkatan Pemahaman Politik Masyarakat dan Stabilitas Politik Daerah	1.091.661.300



Padang Panjang, 11 Maret 2019  
**KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA,  
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KOTA PADANG PANJANG**



12 M. A. SISIKA AND



**PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG**  
**KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT**  
Jln. Rasuna Said No.04 Kampung Manggis Telp. (0752) 7020887 Padang  
Panjang  
Email : [kominfo.pdgpanjang@gmail.com](mailto:kominfo.pdgpanjang@gmail.com)  
Website: [www.padangpanjangkota.go.id](http://www.padangpanjangkota.go.id)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : OKSAH KEEBENDRIP, SH

Jabatan : CAMAT PADANG PANJANG BARAT KOTA PADANG PANJANG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : FADLY AMRAN, BBA

Jabatan : WALIKOTA PADANG PANJANG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Padang Panjang, 11 Maret 2019  
**PIHAK PERTAMA**  
**CAMAT PADANG PANJANG BARAT**



PERMINTAH KOTA PADANG PANANG  
KECAMATAN PADANG PANANG BARAT

Jl. Raya Sari No.40114 Padang Panjang Maluku Telp. (0652) 5050887 Padang

E-mail : [kotapadangpanangbarat@indosat.net.id](mailto:kotapadangpanangbarat@indosat.net.id)

Web site : [www.kotapadangpanangbarat.go.id](http://www.kotapadangpanangbarat.go.id)



PERMINTAH KOTA PADANG PANANG

Diketahui bahwa dalam pelaksanaan tugasnya sebagai anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat yang bertujuan

memperbaiki dan memajukan pembangunan daerah

Maen COKAHEEENDRI, SH

berdasarkan pasal 25 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003

Gelar politik dan politik PERTAMA

Maen COKAHEEENDRI, SH

WALIKOTA PADANG PANANG

berdasarkan Surat BIRAHN PERTAMA, sejauh ini dapat diketahui bahwa

BIRAHN PERTAMA, pada hari ini, dihadapkan dengan seorang warga negara Indonesia yang berinisial Maen COKAHEEENDRI, SH, yang merupakan anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat yang bertujuan

untuk menghindari penganiayaan oleh seorang warga negara Indonesia yang berinisial Maen COKAHEEENDRI, SH, yang merupakan anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat yang bertujuan

untuk menghindari penganiayaan oleh seorang warga negara

Pada hari Jumat, 11 Maret 2010  
BIRAHN PERTAMA  
WALIKOTA PADANG PANANG BARAT

No. 1480120 500004 015  
CKAHEEENDRI, SH

BIRAHN PERTAMA  
WALIKOTA PADANG PANANG

LADY AMRA, SH

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**  
**KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT**  
**KOTA PADANG PANJANG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	- Persentase Realisasi Anggaran SATIMISAKE	85%
		- Persentase tingkat partisipasi masyarakat	13%
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Kelurahan Terhadap Pelayanan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	78

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Peningkatan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan/Kelurahan	271.207.000
2.	Peningkatan Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan/Kelurahan	3.679.122.400
3.	Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan/Kelurahan	327.206.000
4.	Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kecamatan	17.030.000
5.	Percepatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	4.948.100.000







**PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG  
KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR**  
Jalan H. Sumanik No.1 Telp. (0752) 82894  
Padang Panjang, 27124

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DONI RAHMAN, S.Pd.I

Jabatan : CAMAT PADANG PANJANG TIMUR KOTA PADANG PANJANG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

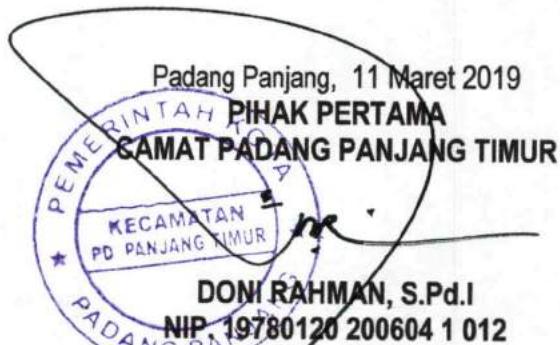
Nama : FADLY AMRAN, BBA

Jabatan : WALIKOTA PADANG PANJANG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**  
**KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR**  
**KOTA PADANG PANJANG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	Persentase Realisasi Anggaran SATIMISAKE	32,11
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Kelurahan Terhadap Pelayanan Kelurahan	Persentase tingkat partisipasi masyarakat	15
		Indeks Kepuasan Masyarakat	78

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Program Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan/Kelurahan	308.045.500
2.	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kecamatan	10.100.000
3.	Program Peningkatan Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan/Kelurahan	3.182.592.000
4.	Program Peningkatan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan/Kelurahan	223.228.000
5.	Program Percepatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	5.965.380.500



Padang Panjang, 11 Maret 2019

CAMAT PADANG PANJANG TIMUR

KOTA PADANG PANJANG

DONI RAHMAN, S. Pd. I  
NIP. 19780720 200604 1 012





## **PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**

Jln. Tabek Gadang Bukit Kandung Ganting No. Telp. (0752) 484250 Padang Panjang  
Email: kominfo.pdgpjg@gmail.com -Website: www.padangpanjangkota.go.id

### **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : dr. ARDONI

Jabatan : DIREKTUR RSUD

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : FADLY AMRAN, BBA

Jabatan : WALIKOTA PADANG PANJANG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Padang Panjang, 11 Maret 2019  
**PIHAK PERTAMA**  
**DIREKTUR RSUD KOTA PADANG PANJANG**





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**  
**KOTA PADANG PANJANG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan RSUD	Penilaian Akreditasi RSUD sesuai dengan Standar Akreditasi versi SNARS 1	Madya

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	52.000.000.000
2	Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana RS	13.495.950.000



PERILAKUAN MENERA TAHUN 2016  
 SUMAH SAKIT UMUM DAEERAH  
 KOTA PAUDING PUNJANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Wajah-wajah Negara Pria dan Wanita	3	4

ANGGARAN  
 25.000.000,000  
 19.485.000

PROGRAM  
 Pendidikan dan Kebudayaan  
 6

Pakuan Pajang, N. Matang 5018  
 DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAEERAH

WALIKOTA PAUDING PUNJANG



RSBD

LADY AMARAN BBA